

KAJIAN POTENSI INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya kegiatan Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dokumen Kajian ini merupakan hasil akhir dari proses kegiatan Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah Di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Buku laporan ini berisikan pendahuluan, landasan kebijakan dan landasan teori, Instrumen Metodologi Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah, Gambaran Ekonomi Sektoral, Identifikasi Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah, Menetapkan Sektor Unggulan Dan Produk Unggulan, Identifikasi Permasalahan Investasi Produk Unggulan Daerah, Mendorong Terwujudnya One Village One Product (Ovop), Merumuskan Strategi Peningkatan Dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Kesimpulan dan Rekomendasi.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Dokumen Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Juni 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1 Pendahuluan.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.3 Sasaran.....	I-6
1.4 Landasan Hukum	I-7
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan.....	I-8
1.6 Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN KEBIJAKAN.....	II-1
2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	II-1
2.2 Teori Pembangunan Daerah.....	II-3
2.3 Sumberdaya Pembangunan Daerah	II-11
2.4 Pendekatan Pembangunan Daerah.....	II-14
2.5 Teori Lokasi Pertumbuhan	II-16
2.6 Konsep Daya Saing Daerah	II-18
2.7 Indikator Utama Daya Saing Daerah.....	II-20
2.8 Peran Industri dalam Pengembangan Wilayah.....	II-22
2.9 Sektor Unggulan	II-23
2.10 Kebijakan Produk Unggulan Daerah.....	II-24
2.11 Manajemen Pemasaran	II-28
BAB 3 INSTRUMEN METODOLOGI POTENSI INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH	III-1
3.1 Jenis Data.....	III-1
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	III-1
3.3 Jumlah Sampel	III-2

3.4 Tahapan Analisis..... III-3

BAB 4 GAMBARAN EKONOMI SEKTORAL IV-1

4.1 Struktur Ekonomi..... IV-1

4.2 Pertumbuhan Ekonomi IV-3

4.3 Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha IV-5

BAB 5 IDENTIFIKASI POTENSI INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH

5.1 Sektor Ekonomi Unggulan V-1

5.2 Potensi Investasi..... V-2

BAB 6 MENETAPKAN SEKTOR UNGGULAN DAN PRODUK UNGGULAN

6.1 Menetapkan Sektor Unggulan VI-1

BAB 7 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH

7.1 Identifikasi Permasalahan Sektor Pertanian, Peternakan, Tanaman Pangan dan Holtikultura VII-1

7.2 Identifikasi Permasalahan Sektor Perikanan VII-5

7.3 Identifikasi Permasalahan Sektor Industri VII-12

BAB 8 MENDORONG TERWUJUDNYA ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)

8.1 Definisi OVOP (One Village One Product) VIII-1

8.2 Tujuan OVOP (One Village One Product) VIII-2

8.3 Implementasi Produk Unggulan Daerah VIII-2

BAB 9 MERUMUSKAN STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

9.1 Pengembangan Pemasaran melalui hubungan masyarakat & publisitas .IX-1

9.2 Pengembangan Bahan-bahan Instruksi IX-3

9.3 Pengembangan Komunikasi PersonalIX-3

BAB 10 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

10.1 Kesimpulan X-1

10.2 Rekomendasi X-2

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Analisis LQ Kabupaten Kotawaringin Barat.....	V-1
Tabel 5.2 Data IKM Perkomoditi Tahun 2019 Kabupaten Kotawaringin Barat	V-2
Tabel 5.3 Data IKM Perkomoditi Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat	V-3
Tabel 5.4 Data IKM Perkomoditi Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat	V-4
Tabel 5.5 Data IKM Perkomoditi Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat ...	V-5
Tabel 7.1 Pemetaan Permasalahan di Sektor Pertanian, Peternakan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	VII-1
Tabel 7.2 Isu-isu strategis sector pertanian, peternakan, tanaman pangan dan holtikultura	VII-4
Tabel 7.3 Permasalahan dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi di sector perikanan dan ketahanan pangan.....	VII-11
Tabel 7.4 Isu-isu strategis sector perikanan dan ketahanan pangan.....	VII-12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik (otonomi daerah). Melalui pelaksanaan otonomi kewenangan pemerintah daerah sepenuhnya dapat dilaksanakan, baik mengenai urusan di bidang pemerintahan maupun di bidang keuangan yang harus dilakukan dengan sistem manajemen yang profesional. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut lebih untuk menyiapkan rencana pembangunan, menentukan sektor unggulan atau prioritasnya, dan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pemberlakuan otonomi daerah mengisyaratkan adanya pengakuan terhadap keanekaragaman sumberdaya yang dimiliki daerah dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri melalui *local self government* dan untuk melaksanakan model pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokalnya (*local specific*). Selain itu, diberlakukannya Otonomi Daerah tersebut akan mempunyai implikasi yang luas dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam merencanakan arah pembangunannya. Di sisi lain, pemerintah daerah akan semakin dituntut untuk lebih mandiri di dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan di daerahnya.

Otonomi daerah juga mengisyaratkan semakin pentingnya pendekatan pembangunan dengan basis pengembangan wilayah pendekatan pembangunan dengan pendekatan sektoral. Pembangunan berbasis pengembangan wilayah

memandang pentingnya keterpaduan intersektoral, interspasial, serta antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam dan antardaerah.

Keterpaduan intersektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional dan sinergi antar sektor-sektor pembangunan, sehingga setiap program pembangunan di dalam kelembagaan sektoral selalu dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Dampak kewenangan tersebut telah memposisikan daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan *good governance* yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif semakin besar. Keleluasaan penggunaan dana yang telah meningkat cukup signifikan, harus mendapatkan pengelolaan yang baik, yaitu melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat atau melalui penyelenggaraan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga sudah sewajarnya apabila timbul tuntutan terhadap reformasi pengelolaan keuangan daerah guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan elemen penting untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan keuangan daerah yang tepat, efisien, efektif, dan bertanggung jawab membutuhkan adanya transparansi dalam proses penyusunan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi yang ada. Sehingga mempengaruhi sistem penganggaran yang ada di berbagai daerah untuk lebih berpihak kepada kepentingan publik. Tanpa penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang tepat, maka dapat memicu

ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan daerah, dan menimbulkan persepsi yang keliru mengenai orientasi pengeluaran lebih difokuskan bagi kesejahteraan aparatur dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat.

Para perencana daerah diharapkan dapat menyusun rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Identifikasi dan pengembangan sektor-sektor unggulan merupakan langkah strategis bagi daerah karena beberapa alasan berikut:

1. Sektor unggulan dapat dijadikan arah, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah agar pembangunan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien, terutama karena keterbatasan sumberdaya daerah. Alokasi sumberdaya tidak mungkin diterimakan secara merata pada seluruh sektor yang ada, tetapi harus difokuskan pada sektor tertentu berdasarkan skala prioritas.

2. Sektor unggulan dapat berfungsi sebagai motor penggerak sektor-sektor perekonomian secara keseluruhan. Selain memacu sektor secara internal, sektor unggulan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya dengan adanya keterkaitan antarsektor.

3. Mengingat posisi strategis yang dimiliki suatu daerah baik dilihat dari letak geografis maupun posisinya sebagai titik-titik pertumbuhan (aglomerasi) maka sektor unggulan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah sekitarnya (*hinterland*).

Era globalisasi yang identik dengan pasar bebas telah memasuki tahap implementasi di beberapa kawasan. Di wilayah daratan Asia Tenggara misalnya pada awal Tahun 2010 atau tepatnya sejak 1 Januari 2010, telah diimplementasikan wilayah perdagangan bebas Negara-negara ASEAN dengan China atau dikenal dengan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA). Kemudian pada penghujung Tahun 2015 (31 Desember 2015) disusul dengan

pemberlakuan perdagangan bebas di wilayah ASEAN yang disebut ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pasar bebas dapat dianggap peluang bagi pelaku dunia usaha manakala mereka mampu menciptakan efisiensi produksi yang mengarah kepada keunggulan kompetitif maupun komparatif serta diversifikasi produk, dan sebaliknya menjadi ancaman ketika industri domestik tidak mampu mengeksplorasi, memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal yang dapat menciptakan keunggulan produk di pasar global.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam perekonomian nasional saat ini adalah masih rendahnya daya saing produk di pasar internasional. Beberapa faktor penyebabnya adalah adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, belum memadainya layanan birokrasi, masih lemahnya struktur sektor industri (lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir atau industri besar dengan industri kecil dan menengah, belum terbangunnya struktur klaster (industrial cluster) yang saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu) serta belum terjaminnya kontinuitas pasokan bahan baku industri.

Poin penting yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan menengah adalah pada aspek daya saing produk. Daya saing produk tercipta karena kemampuan dunia usaha dalam mengelola sumber daya (lokal) yang dimiliki secara efektif dan efisien serta didukung dengan kebijakan pemerintah dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif sehingga mampu menghasilkan produk unggulan daerah.

Produk unggulan daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil menengah yang potensial; untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumberdaya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal

serta mendatangkan kekuatan ekonomi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Produk unggulan daerah berorientasi pada ramah lingkungan selain berorientasi kepada pasar baik lokal, regional maupun nasional. Pengembangan produk unggulan daerah pada era otonomi merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan, hal tersebut disebabkan oleh karena pengembangan produk unggulan daerah terkait erat dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Peranan pemerintah daerah sangat penting dan diperlukan dalam pengembangan dan pemberdayaan produk unggulan daerah dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi daerah. Pengembangan produk unggulan daerah berkaitan erat dengan peran serta stakeholders baik pemilik bahan baku maupun pengolah/penghasil bahan baku serta pengguna /konsumen yang saling terkait satu dengan yang lainnya sebagai instrumen penting dalam pengembangan produk unggulan daerah.

Berdasarkan potensi yang ada serta dalam rangka sinergitas kebijakan nasional dan daerah guna peningkatan daya saing produk domestik, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bermaksud melakukan Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah. Output studi ini diharapkan mampu memberikan arah/pedoman Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya terkait pengembangan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan kajian potensi investasi produk unggulan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah menyediakan data/informasi terkait dengan produk unggulan daerah, produk andalan daerah dan produk

potensial yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat serta strategi pemasarannya.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi produk unggulan daerah, produk andalan dan produk potensial secara sektoral (per sektor) baik pada level kecamatan maupun sektoral di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Melakukan penilaian terhadap produk unggulan daerah, produk andalan dan produk potensial secara sektoral (per sektor) baik pada level kecamatan maupun sektoral di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Melakukan identifikasi masalah dan potensi pemasaran terhadap produk unggulan daerah, produk andalan dan produk potensial secara sektoral (per sektor) baik pada level kecamatan maupun sektoral di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. Menyusun strategi pemasaran terhadap produk unggulan daerah, produk andalan dan produk potensial secara sektoral (per sektor) baik pada level kecamatan maupun sektoral di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- e. Menyusun rumusan materi komunikasi pemasaran terhadap produk unggulan daerah, produk andalan dan produk potensial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan kajian potensi investasi produk unggulan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen yang diharapkan mampu memberikan arah/pedoman Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya pengembangan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang-undang dibuat untuk menegaskan independensi BI sebagai Bank Sentral yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- g. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah ke empat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Produk Unggulan Daerah, penetapan produk unggulan daerah;

1.5. Ruang Lingkup Kegiatan

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah Kajian

Ruang lingkup wilayah adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.5.2. Ruang Lingkup Kategori Produk/Komoditas

Ruang lingkup kategori produk/komoditas terdiri dari :

- Produk/Komoditas Unggulan
- Produk/Komoditas Andalan
- Produk/Komoditas Potensial.

Pengklasifikasian produk (produk unggulan, produk andalan dan produk potensial daerah) dimaksud dihitung berdasarkan pada sekup wilayah kecamatan dan tingkat kabupaten.

1.5.3. Ruang Lingkup Kategori Sektoral

- Produk/Komoditas Unggulan per sektor
- Produk/Komoditas Andalan per sektor
- Produk/Komoditas Potensial per sektor

Kemudian dianalisa/dipetakan juga sektor mana yang paling unggul di Kabupaten Kotawaringin.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan pendahuluan kegiatan Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan, dasar hukum dan sistematika penulisan penyusunan kegiatan

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Bab II Landasan Kebijakan dan Landasan Teori

Bab ini berisikan tinjauan kebijakan dan landasan teori yang terkait dengan Penyusunan Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Bab III Metodologi

Bab ini berisikan metodologi dan jenis analisis yang akan digunakan untuk kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. Bab IV Gambaran Ekonomi Sektoral

Bab ini berisikan gambaran umum sektor ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat.

5. Bab V Rencana Kerja dan Komposisi Tim

Bab ini berisikan rencana kerja, jadwal pelaksanaan pekerjaan, sistematika pelaporan, komposisi tim, tugas dan jadwal penugasan pada masing-masing tenaga ahli dan tenaga pendukung.

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang mutlak menjadi kebutuhan setiap daerah ataupun suatu negara, pertumbuhan ekonomi bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan kondisi eksisting suatu wilayah atau daerah ketika pertumbuhan perekonomian tersebut memiliki model pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kultur, demografi, geografis, kondisi masyarakat dan pemerintah yang ada di daerah tersebut. Model pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan oleh para perencana pembangunan pada negara atau wilayah sedang berkembang adalah model pertumbuhan Harrod Domar (HD), dimana model ini lebih menjelaskan peranan investasi atau akumulasi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan ini didasarkan pada teori produksi yang menyatakan bahwa besarnya produksi atau output (Y) sangat ditentukan oleh besarnya ketersediaan kapital (K) dan tenaga kerja atau jumlah penduduk (L). Model pertumbuhan perekonomian dikatakan koheren dengan wilayah sedang berkembang karena output baik itu barang ataupun jasa yang dihasilkan pada masing – masing sektor lebih ditentukan oleh kepemilikan kapital dan sumber daya manusia, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut (Djojohadikusumo, 1994):

$$Y = f(K, L)$$

Berdasarkan teori produksi tersebut, model pertumbuhan HD dikembangkan, dengan asumsi bahwa perekonomian berada pada kondisi

fullemployeement atau *full utilization*. Artinya, sumberdaya yang tersedia baik berupa kapital maupun tenaga kerja digunakan secara penuh, atau dengan kata lain, perekonomian dalam kondisi keseimbangan. Dengan adanya asumsi ini diharapkan bahwa ketika dilihat dari unsur tenaga kerja maka semua manusia dengan usia kerja dapat terserap sempurna sehingga mampu memberikan kontribusi output yang optimal.

Selanjutnya, persamaan (1) dirubah menjadi fungsi produksi pada tiap populasi, sehingga persamaan tersebut berubahmenjadi:

$$Y/L = f(K/L) \text{ atau } Y_t = f(K_t)$$

Persamaan (2) mengisyaratkan besarnya pendapatan perkapita sangat tergantung pada ketersediaan kapital per kapita. Selanjutnya, terbentuknya kapital (ΔK) atau investasi (I) sangat tergantung pada: (i) tingkat kecenderungan pembentukan kapital (*Incremental Capital Output Ratio*) yang sering disebut dengan ICOR, dan (ii) tingkat pendapatan masyarakat (Y). Secara matematis, bentuk hubungan antara modal dan pendapatan dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$I = \Delta K = k * \Delta Y$$

Dimana, k dalam persamaan (3) adalah nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang mencerminkan tingkat produktifitas kapital. Persamaan (3) mencerminkan adanya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, yaitu sebesar ΔY . Besarnya kebutuhan investasi dapat terwujud jika terdapat pembentukan tabungan masyarakat yang memadai. Perkembangan tabungan masyarakat sangat tergantung pada pendapatan masyarakat dan besarnya tingkat kecenderungan menabung (s). Secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$S = s * Y$$

Dimana S adalah besarnya tabungan masyarakat dan Y adalah tingkat pendapatan. Kondisi keseimbangan tercapai jika kebutuhan investasi (ΔK atau I) sama besarnya dengan tingkat tabungan (S) yang ada dalam masyarakat. Sehingga, mensubstitusikan persamaan (4) pada (3) akan diperoleh persamaan berikut:

$$k * \Delta Y - s * Y, \text{ atau } \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

Dimana, $\Delta Y/Y$ adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat tergantung pada besarnya kecenderungan masyarakat dalam menabung (s) dan tingkat produktifitas kapital ($1/k$). Persamaan (5) mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada besarnya akumulasi dan produktifitas kapital yang terjadi pada masyarakat. Dengan demikian, model pertumbuhan HD sangat implementatif untuk digunakan sebagai metode untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Namun, model ini memiliki kelemahan jika digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi sektoral, terutama jika menginginkan model perencanaan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan.

2.2. Teori Pembangunan Daerah

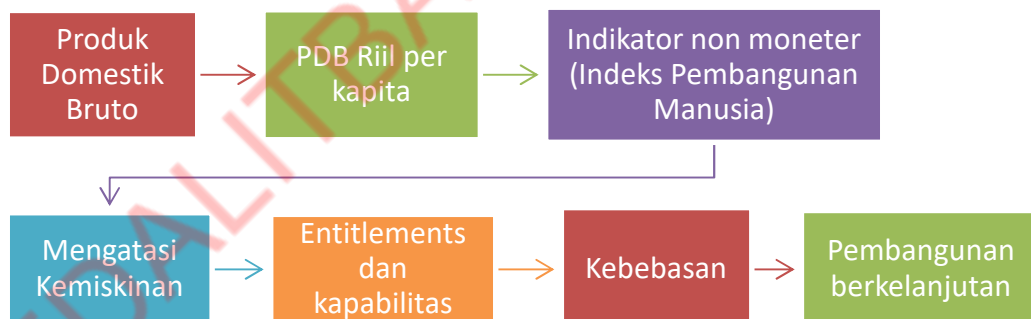
Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Kinerja pembangunan yang sangat baikpun mungkin saja menciptakan berbagai masalah sosial ekonomi baru yang tidak pernah diharapkan, kompleksitas permasalahan bertambah besar karena ruang lingkup permasalahannya bertambah luas. Pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB pada tingkat nasional) yang tinggi, telah memperlihatkan keberhasilan secara memuaskan di berbagai bidang dan sektor pembangunan, yang diukur dalam tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang

memperlihatkan peningkatan secara terus menerus, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, ekspor menjadi lebih baik.

Seiring semakin berkembangnya zaman konsep dari pembangunan dewasa ini semakin kompleks. Dewasa ini sasaran dari pembangunan adalah bagaimana menciptakan pembangunan yang *sustainable*. Pembangunan tidak hanya berbicara mengenai peningkatan PDB semata akan tetapi pembangunan yang sebenarnya adalah pembangunan dimana peningkatan PDB dimana tetap memperhatikan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta terpenuhinya kebebasan dan hak setiap individu yang ada serta berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menciptakan output yang maksimal.

Gambar 2.1

Pergeseran Paradigma Pembangunan



Sumber: Mudrajat Kuncoro (2004)

Struktur perekonomian menjadi lebih kokoh ditunjukkan dengan menurunnya peranan sektor pertanian dan meningkatnya peranan sektor perindustrian dalam PDB. *Statement* tersebut sepertinya telah diterima mentah – mentah oleh sebagian masyarakat, sehingga kebanyakan pada kasus negara miskin atau negara berkembang banyak para pencari kerja berbondong melakukan transmigrasi pekerjaan dari pertanian menuju industri dan

celakanya sektor pertanian tidak lagi diberdaya gunakan secara maksimal. Dalam jangka pendek perpindahan sektor pertanian menuju sektor industri seperti ini memang akan menciptakan multiplier effect yang cukup besar dalam jangka pendek.

Ternyata pertumbuhan yang tinggi itu telah mengakibatkan bertambahnya lebarnya ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal), begitu pula terjadi kesenjangan antar golongan di masyarakat telah menimbulkan konsep “garis kemiskinan” (*proverty line*) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Mereka dikatakan berada pada garis kemiskinan (*absolute poverty*) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kesenjangan dan ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi dan disparitas ekonomi yang semakin lebar dan tajam. Ketimpangan pembangunan yang semakin tinggi itu dapat diatasi dengan konsep pemerataan pembangunan wilayah.

Pengembangan wilayah didasarkan pada pengembangan kegiatan sektoral atau spasial (ruang) dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkup tertentu. Kegiatan pengembangan wilayah dibatasi dengan ruang dan sektor yang berdasarkan aktivitas efisiensi produksi dari suatu wilayah yang ditopang oleh wilayah sekitar atau wilayah lainnya sehingga memberikan dampak baik secara *spillover effect* maupun *backwash effect* karena aktivitas tersebut. Pendekatan wilayah (regional) bertolak pada kenyataan bahwa setiap kegiatan ekonomi pada wilayah, selalu memanfaatkan dan menempati ruang (spasial) wilayah disamping dimensi lokalitas.

Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja, dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan fiskal daerah, kewirausahaan, kelembagaan dan lingkungan, menjadi basis acuan pembangunan wilayah secara komprehensif.

Pada hakekatnya teori pembangunan ekonomi secara nasional mempunyai definisi dan tujuan yang sama dengan teori pembangunan ekonomi daerah. Perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkup wilayahnya. Oleh sebab itu sebelum membahas masalah pembangunan daerah ada baiknya dibahas terlebih dahulu pengertian daerah (regional). Daerah adalah suatu areal geografis yang merupakan suatu kesatuan. Pada intinya, ada tiga konsep daerah, yakni daerah homogen, daerah nodal, dan daerah administratif.

Daerah homogen adalah suatu daerah gabungan beberapa areal geografis yang memiliki karakteristik yang sama, walaupun letaknya secara fisik tidak bersebelahan. Daerah nodal adalah areal-areal yang strukturnya terdiri atas areal inti dengan areal-areal sekitarnya yang melengkapi, yang terpadu, dalam arti ekonomi, dengan areal inti itu. Sedangkan daerah administratif adalah kesatuan administratif atau politik pemerintahan. Di Indonesia daerah administratif dikenal sebagai propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Daerah yang paling tepat untuk keperluan pembangunan daerah adalah daerah nodal, tetapi justru kurang dikembangkan di berbagai negara.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2005).

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Salah satu konsep yang ditawarkan saat ini adalah konsep paradigma baru teori pembangunan daerah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan, semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan tenaga kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber : Arsyad (2005)

Menurut Kuncoro (1997), pembangunan regional sebaiknya lebih memperhatikan keunggulan-keunggulan dan karakteristik khusus dari setiap daerah. Pembangunan juga harus meningkatkan partisipasi lokal sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat lokal. Pendapatan perkapita penduduk akan meningkatkan daya tarik daerah tersebut

untuk menarik investor-investor baru yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi seperti; sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah), enterpreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Dalam upaya mengatasi masalah pokok dalam proses pembangunan daerah maka muncul teori-teori pembangunan daerah. Pada hakekatnya inti dari teori pembangunan ekonomi daerah berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika dibuat suatu ringkasan, teori pembangunan ekonomi daerah menyatakan bahwa, pembangunan daerah ditentukan oleh faktor-faktor diantaranya: sumberdaya alam, tenaga kerja, investasi, intrepreneursip, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan (Arsyad, 2005).

Sampai saat ini belum ada suatu teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh. Hal ini dapat dipahami karena masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan atau karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogenous development*)

dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal/daerah.

Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat digunakan untuk memahami arti pentingnya pembangunan ekonomi daerah, seperti teori ekonomi Neo-klasik, teori basis ekonomi, teori proses pertumbuhan daerah, teori basis ekspor, teori basis sumber daya, teori lokasi, teori tempat sentral dan teori pusat pertumbuhan.

Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Staurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi, Para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 2005).

Kuznets (1995) yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada

tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik (Todaro, 2000). Banyak negara-negara Asia nampaknya mengikuti kurva Kuznets dalam kesejahteraan pendapatan, tetapi puncaknya telah dicapai ketika ekonomi masih didominasi pertanian dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah dari pada di negara-negara barat.

Pada dasarnya teori-teori yang mengemukakan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu pertama *inward looking* teori, menganalisis pertumbuhan yang diakibatkan oleh intern daerah itu sendiri misalnya *the export base theory* dan *the sector theory* dan yang kedua *outward oriented theory* yang menekankan pada mekanisme yang mendasari penurunan pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah ke daerah lain. Kedua pendekatan ini dalam penerapannya antara satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi.

Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah dapat digunakan tripologi Klassen sebagai alat analisis. Dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan masing-masing daerah yaitu daerah pertumbuhan cepat (*rapid growth region*), daerah tertekan (*retarded region*), daerah sedang bertumbuh (*growing region*) dan daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*). Kuncoro (2004) menggunakan alat analisis ini untuk mengklasifikasikan wilayah menjadi ke dalam empat kelompok, yaitu (a) *low growth, high income*, (b) *high growth, high income*, (c) *high growth, low income*, dan (d) *low growth, low income*.

Pada hakekatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Arsyad, 2005). Dengan kata

lain, berbagai teori yang menjelaskan pembangunan ekonomi daerah tersebut diharapkan tidak hanya berguna untuk menjelaskan perubahan dalam pembangunan daerah dan memperkirakan implikasi dari keputusan ekonomi yang diambil, tetapi juga berguna untuk membuat perencanaan ke depan.

2.3. Sumberdaya Pembangunan Daerah

Hasil yang ingin dicapai dari suatu pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah membuka pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Dengan pekerjaan yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan kekayaan dan pendapatan, dan sebagainya yang pada akhirnya akan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Namun demikian, menurut (Arsyad, 2005) harus disadari bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan fisik atau peraturan-peraturan (*attitudinal*) yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat, pemerintah daerah menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang utama. Lebih lanjut Arsyad mengemukakan ada 3 sumberdaya pembangunan utama untuk melakukan proses pembangunan daerah, yaitu:

1. *Lingkungan Fisik sebagai Sumberdaya Perencanaan*

Pemerintah daerah biasanya memperhatikan masalah lingkungan fisik-infrastruktur fisik yang tentu saja penting bagi dunia usaha dan industri. Sektor swasta biasanya memiliki keinginan-keinginan, baik yang bersifat khusus maupun umum dan persyaratan-persyaratan tertentu untuk lingkungan fisik. Kebutuhan khusus biasanya mencakup jasa angkutan khusus atau jasa pembuangan limbah. Dalam banyak hal, bentuk-bentuk lingkungan fisik ini bisa menyediakan jasa atau fasilitas khusus untuk memenuhi keinginan dunia usaha atau industri.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dari investasi sektor swasta adalah daya tarik (*attraction*) atau *amenity* dari suatu daerah atau suatu kota. Bentuk dari daya tarik atau *amenity* ini sering disebut kualitas hidup. Dunia industri atau bisnis menganggap "*livability*" sebagai suatu faktor lokasional yang penting dan pemerintah daerah berada pada posisi yang terbaik untuk memperbaiki kualitas hidup daerahnya.

2. Lingkungan Regulasi sebagai Sumberdaya Perencanaan

Kita semua memahami bahwa insentif dan kebijakan-kebijakan keuangan merupakan input penting bagi proses pembangunan ekonomi. Banyak pemerintah daerah sekarang yang dengan sungguh mengkaji ulang sistem regulasinya untuk menunjukkan bahwa "biaya untuk melakukan kegiatan usaha" di daerah mereka mencerminkan keinginan mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan kata lain, untuk menarik dan mengembangkan dunia usaha di daerahnya perlu penyederhanaan sistem regulasi. Misalnya, beberapa kota di negara maju belakangan ini telah menciptakan pusat pelayanan bisnis terpadu

3. Lingkungan Attitudinal sebagai Sumberdaya Perencanaan

Keputusan yang diambil sektor swasta mengenai ekspansi investasi atau relokasi tidak hanya didasarkan pada data kasar. Dalam kenyataannya, keputusan akhir akan sangat dipengaruhi juga oleh semacam "*feeling*" atau "*judgment*" investor mengenai reaksi masyarakat daerah calon lokasi investasi. Dunia usaha sering kali tidak akan memilih suatu daerah tertentu karena penduduknya dikenal, misalnya bersikap "anti bisnis".

Menurut Arsyad (2005), untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan sumberdaya pembangunan di atas setidaknya membutuhkan informasi data sebagai berikut:

1. Data kependudukan

Data kependudukan yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah struktur penduduk (*hierarchy of age grouping*) yang dikaitkan dengan tingkat pengerjaan (*employment*), umur, pendapatan, dan distribusi penduduk menurut pekerjaan selama kurang lebih sepuluh tahun; dan *burden of dependency ratio*.

Tujuan analisis kependudukan ini adalah untuk menentukan karakteristik penduduk pada suatu daerah karena karakteristik penduduk tersebut berkaitan dengan vitalitas masyarakat dan untuk menaksir target penduduk untuk kegiatan ekonomi yang diinginkan.

2. *Kondisi pasar tenaga kerja*

Data yang berkenaan dengan kondisi pasar tenaga kerja antara lain: informasi tentang distribusi pekerjaan menurut jenis kelamin pada setiap industri, informasi tentang pengangguran dan setengah pengangguran setiap sektor paling selama 5 tahun terakhir. Pola pengerjaan dalam suatu masyarakat akan menunjukkan apakah sumber daya manusia tersedia atau dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi dan berapa jumlah angkatan kerja yang membutuhkan bantuan.

3. *Karakteristik Ekonomi*

Data ekonomi yang diperlukan antara lain: basis ekonomi suatu daerah, perubahannya, dan responnya terhadap perubahan keadaan ekonomi baru; selain kondisi ekonomi masa lalu dan sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi vitalitas ekonomi juga perlu untuk dikaji. Pemahaman yang baik terhadap struktur ekonomi merupakan tahapan yang esensial dalam merancang program pembangunan ekonomi jangka panjang.

4. *Kondisi Fisik/Lokasional*

Data yang diperlukan untuk kondisi fisik ini meliputi kajian tentang kondisi dan bentuk fisik dari suatu daerah yang berhubungan dengan basis

ekonominya, termasuk penilaian tentang sumberdaya fisik (pertanian, pertambangan, dan sebagainya), ketersediaan lahan untuk kawasan industri, jaringan transportasi dan komunikasi, persediaan perumahan, dan juga aset yang dapat digunakan untuk daerah tujuan wisata. Pendokumentasian terhadap aset-aset lokasional dan "*liabilities*" membantu kita dalam mengidentifikasi keunggulan ekonomi daerah dan kelemahannya.

2.4. Pendekatan Pembangunan Daerah

Dalam menjelaskan pembangunan daerah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Menurut Adisasmita (2014), setidaknya ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan pembangunan daerah, yaitu: Pendekatan sektoral; Pendekatan makro; dan Pendekatan regional.

2.4.1. Pendekatan Sektoral

Pendekatan sektoral menganggap perlunya mendekatkan pembangunan nasional melalui kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sub-sub sektor atau sektor-sektor. Adapun dasar berpijaknya adalah mekanisme pengelolaan satuan maupun kelompok kegiatan usaha sehingga dapat membawa dampak pengembangan yang langsung dirasakan oleh satuan-satuan kegiatan usaha. Tujuan atau sasaran pembangunan yang hendak dicapai dan hasilnya juga terungkap secara sektoral, yaitu baik yang menyangkut hasil produksi, pendapatan, lapangan kerja maupun investasi dan kredit yang digunakan.

Dengan pendekatan ini, pembangunan dapat dikelola lingkup nasional maupun daerah seperti Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya). Dalam hal ini, dimensi wilayah hanya tampil sebagai indeks, yakni untuk melokalisasi sektor-sektor ke dalam daerah-daerah dan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kemudahan dan penyebarannya yang pasti.

2.4.2. Pendekatan Makro

Pendekatan makro pada dasarnya memperhitungkan adanya tiga jenis kekuatan yang bekerja dalam kehidupan manusia, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan sosial dan kekuatan politik. Ketiga elemen tersebut merupakan satu kesatuan atau bagian yang saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan nasional. Akan tetapi, pendekatan makro seperti halnya pendekatan sektoral, tidak ditujukan untuk menunjukkan tingkat kemudahan dan penyebarannya yang pasti.

Pendekatan makro digunakan untuk merencanakan dan mengukur hasil pembangunan nasional secara makro. Perkembangan kehidupan ekonomi diukur di antaranya melalui tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah uang yang beredar, tingkat inflasi dan tingkat harga barang-barang. Perkembangan kehidupan sosial diukur misalnya melalui tingkat pemerataan dalam penyediaan kesempatan berusaha (kerja) ataupun dalam hal tingkat kesejahteraan hidup dan perkembangan seni dan budaya pada umumnya. Pada sisi lain, kehidupan politik diukur dengan pelaksanaan hidup berkonstitusi, eksistensi serta peranan kekuatan sosial-politik dan pelaksanaan kehidupan berdasarkan hukum serta pelaksanaan kewajiban hak warga negara pada umumnya.

2.4.3. Pendekatan Regional

Pendekatan regional atau pendekatan wilayah berangkat dari kenyataan bahwa setiap kegiatan usaha selalu terkait dengan wilayah. Dengan kata lain, setiap kegiatan usaha selalu menempati atau bergerak dalam ruang wilayah

tertentu. Dalam kaitan ini, pemanfaatan wilayah mencakup aspek lokasi dan aspek dimensi wilayah.

Aspek lokasi wilayah berkaitan dengan fungsi lindung dan pilihan lokasi untuk tempat pemukiman ataupun kegiatan usaha yang kesemuanya ditujukan untuk memperoleh kemudahan bagi masyarakat di wilayah tertentu, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Pada sisi lain, aspek dimensi wilayah berkaitan dengan masalah tata guna tanah seperti petunjuk tentang batas-batas wilayah.

Berdasarkan kedua aspek tersebut di atas, maka pendekatan regional jelas menampilkan sumber dorongan bagi pengembangan kegiatan usaha yang bersifat multi sektoral dan bahkan dalam artian peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Sumber dorongan tersebut berbeda pada lokasi yang pasti dan memberikan pengaruh besar atau sentral yang selanjutnya dapat diterjemahkan sebagai kemudahan.

2.5. Teori Lokasi Pertumbuhan

Teori lokasi merupakan cabang ilmu ekonomi regional paling tua yang dikembangkan sejak abad kesembilan belas oleh H.W. Richardson. Teori ini diilhami oleh pertanyaan Weber, yaitu pertanyaan mengapa pabrik-pabrik cenderung berlokasi saling berdekatan. Teori lokasi adalah teori yang menjelaskan di mana dan bagaimana suatu aktivitas ekonomi memilih lokasinya secara optimal. Dengan demikian lokasi perusahaan-perusahaan atau kegiatan ekonomi memerankan peranan penting bagi lokasi daerah. Keputusan-keputusan lokasi perusahaan-perusahaan dan aktivitas ekonomi seharusnya menyebabkan timbul dan berkembangnya daerah-daerah.

Teori lokasi ini adalah selalu mengutamakan pertimbangan faktor posisi sebuah lokasi (tempat) kegiatan ekonomi dari sisi biaya transformasi yang

rendah untuk mendatangkan sumber daya dan memasarkan produk. Menurut Blakely (1994), variabel yang nyata mempengaruhi kualitas dan kecocokan suatu lokasi, seperti upah buruh, biaya usaha dan ketersediaan supplier, komunikasi, fasilitas pusdiklat, kualitas dan respon pemerintah daerah dan sanitasi. Teori lokasi sekarang adalah bahwa teknologi dan telekomunikasi mengubah signifikansi lokasi khusus produksi dan distribusi barang-barang.

Pemilihan lokasi aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi. Faktor-faktor lokasi adalah faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi suatu aktivitas ekonomi, seperti aktivitas produksi atau aktivitas pemberian jasa. Setiap organisasi dari aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi. Dengan kata lain, faktor-faktor lokasi adalah variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan lokasi.

Faktor-faktor lokasi dapat dikelompokkan menjadi dua orientasi yaitu, pertama, orientasi transportasi, yang dimaksud dengan orientasi transportasi adalah bahwa transportasi merupakan porsi terbesar dari biaya total dari organisasi suatu aktivitas ekonomi, sehingga menjadi penentu keputusan lokasi. Faktor-faktor lokasi yang berorientasi transportasi antara lain; faktor transportasi, faktor sumberdaya, faktor pasar, dan faktor tenaga kerja. Kedua, orientasi masukan lokal, yang dimaksud dengan orientasi masukan lokal adalah bahwa masukan lokal itulah yang merupakan persentase terbesar dari biaya total dan disebut lokal bila input itu tidak dapat secara efisien diangkut dari lokasi satu ke lokasi lain. Faktor-faktor lokasi yang berorientasi masukan lokal antara lain; faktor energi, faktor kenyamanan (mutu hidup, kualitas hidup atau gaya hidup), faktor aglomerasi, pelayanan publik setempat, pajak, insentif pemerintah (pusat dan daerah), iklim bisnis setempat, *site costs* (harga tanah dan gedung, fasilitas perkantoran dan gedung), dan stabilitas atau iklim politik.

2.6. Konsep Daya Saing Daerah

Literatur yang secara eksplisit dan spesifik melakukan studi tentang daya saing daerah, yaitu daya saing suatu wilayah di dalam suatu negara (*regions atau sub-region*), lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan publikasi mengenai daya saing negara (PPSK-BI, 2002). Dua diantaranya dilakukan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) yang menerbitkan "*Regional competitiveness Indicators*", serta *Centre for Urban and Regional Studies (CURDS)*, Inggris, dengan publikasinya "*The Competitiveness Project: 1998 Regional Benchmarking Report*".

Menurut UK-DTI definisi daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu CURDS mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Melihat definisi di atas dan mengacu pada definisi daya saing nasional yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, terdapat persamaan yang esensial. Hal yang membedakan kedua pendefinisian di atas hanya terpusat pada cakupan wilayah, dimana yang pertama adalah negara sementara yang terakhir adalah daerah. Dalam berbagai pembahasan tentang daya saing nasional pun, baik secara eksplisit maupun implisit, terangkum relevansi pengadopsian konsep daya saing nasional kedalam konsep daya saing daerah (PPSK-BI, 2002).

Walaupun dilihat dari substansinya pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah adalah relevan, namun dalam prakteknya beberapa penyesuaian perlu untuk dilakukan. Kompetisi ekonomi antar negara yang berdaulat tentu tidak mutlak sama dengan kompetisi antar daerah dalam suatu negara.

Dari pembahasan tentang berbagai konsep dan definisi tentang daya saing suatu negara atau daerah sebagai mana diuraikan di atas, dapat diambil satu

kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut (PPSK-BI, 2002):

a. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”.

b. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semua terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkirkan peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.

c. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatkan daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.

d. Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup.

2.7. Indikator Utama Daya Saing Daerah

Berdasarkan beberapa definisi dari literatur, teori ekonomi, serta berbagai diskusi maka PPSK-BI mendefinisikan konsep daya saing sebagai berikut: “kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan

internasional". Sedangkan indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah 1) Perekonomian Daerah, 2) Keterbukaan, 3) Sistem Keuangan 4) Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, 5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 6) Sumber Daya Manusia, 7) Kelembagaan, 8) Governance dan Kebijakan Pemerintah, serta 9) Manajemen dan Ekonomi Mikro.

Masing-masing indikator daya saing daerah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- ✓ Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek.
- ✓ Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
- ✓ Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu
- ✓ Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.

2) Keterbukaan

3) Sistem Keuangan

4) Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam

- 5) Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- 6) Sumber Daya Manusia
- 7) Kelembagaan
- 8) Governance dan Kebijakan Pemerintah Manajemen dan Ekonomi

Pemahaman masyarakat terhadap daya saing (*competitiveness*) sering kali diartikan sebagai kemampuan untuk bersaing. Pengertian tersebut mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa daya saing lebih sering diterjemahkan sebagai persaingan atau rivalitas yang berkonotasi negatif. Selain itu daya saing juga lebih banyak diartikan sebagai suatu potensi yang bersifat tunggal, sehingga dengan demikian tidak ada upaya pemahaman bagaimana kompleksitas faktor-faktor yang membentuk daya saing. Oleh karena itu tidaklah aneh bila dalam pembicaraan mengenai daya saing, opini yang berkembang bisa menjadi sangat beragam karena masing-masing pihak melihat dari sisi atau faktor yang berbeda. Dalam Konteks daya saing Indonesia misalnya, penempatan daya saing Indonesia pada posisi 49 dari 50 negara oleh *World Economic Forum (WEF)* oleh sebagian kalangan semata-mata disebabkan oleh kemampuan pemerintah (*governance*) yang sangat lemah. Sementara itu kalangan lain mungkin berpendapat bahwa daya saing Indonesia sangat rendah disebabkan oleh tidak profesionalnya pelaku bisnis di Indonesia.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tanpa adanya kesatuan pemahaman yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, daya saing sering kali menyebabkan *misleading* dalam pengambilan kesimpulan dan kebijakan. Oleh karena itu upaya penyatuan pemahaman akan konsep daya saing adalah sangat perlu untuk dilakukan. Konsep daya saing yang dipakai dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh PPSK BI (2002) yang pada dasarnya ditujukan untuk membantu daerah-daerah di Indonesia dalam mengidentifikasi potensi dan prospek ekonomi daerah yang dapat dijadikan sebagai ukuran daya saing.

2.8. Peran Industri dalam Pengembangan Wilayah

Tidak dipungkiri bahwa proses industrialisasi telah merubah pola pertumbuhan ekonomi wilayah secara sektoral, terjadinya perubahan sektor industri yang pesat beberapa tahun terakhir telah menggeser peranan sektor pertanian dalam struktur perekonomian nasional maupun regional. Sektor industri dianggap sebagai pendorong utama (*prime mover*) kegiatan ekonomi utama yang dapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap tumbuhnya sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu, industrialisasi akan menjadi trend pembangunan wilayah melihat transformasi struktural tersebut sejalan yang dialami oleh berbagai negara di dunia dan diprediksi kontribusi sektor industri cenderung meningkat (Kuncoro, 2010). Kegiatan industri merupakan salah satu faktor penting dalam mekanisme perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Hal ini disebabkan adanya efek multiplier dan inovasi yang ditimbulkan oleh kegiatan industri yang berinteraksi dengan potensi dan kendala yang dimiliki wilayah. Rostow mengatakan bahwa tahap tinggal landas dalam pembangunan ekonomi ditandai oleh pertumbuhan yang pesat pada satu atau beberapa sektor industri.

Hubungan antara industri dan wilayah adalah bervariasi antar berbagai wilayah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterkaitan dengan lingkungan, meningkatkan kesempatan kerja, kebutuhan akan bahan baku, sumberdaya alam dan manusia, serta perbandingan keuntungan nasional dan internasional dalam penggunaannya pada berbagai industri (skala);
2. Adanya keterkaitan dengan industri sendiri yang meliputi :
 - Kepentingan industri dan fungsi yang berkaitan dengan berbagai elemen ekonomi wilayah, seperti jenis pekerjaan, kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga, penggandaan antar sektor, pendapatan

sektor ekspor dan penggunaan lahan dari berbagai kegiatan ekonomi. Organisasi sistem dalam arti kepemilikan, pengendalian, skala ekonomi, teknologi, kapitalisasi dan keterkaitan antara organisasi;

- Dinamika sistem, terlihat dari adanya pertumbuhan, perkembangan, stagnasi, kemunduran dan stagnasi, kemunduran dan restrukturisasi yang dihasilkan dari kombinasi kelahiran, migrasi masuk, migrasi keluar atau perubahan lain terhadap kondisi perusahaan yang ada;
 - Tipe industri seperti terlihat pada sektor ekonomi fungsi industri dalam mata rantai produksi, divisi tenaga kerja baik secara nasional maupun internasional.
3. Adanya dampak dari sistem industri dan dinamikanya terhadap kualitas ekonomi, sosial, fisik dan komponen terbangun dari lingkungan masyarakat, khususnya kondisi pasar tenaga kerja, pendapatan riil, kesejahteraan, dan sejenisnya. Untuk dapat mengatasi persoalan yang akan ditimbulkan oleh pembangunan industri, pemerintah daerah perlu mengetahui gambaran menyeluruh mengenai industri itu sendiri serta dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan.

2.9. Sektor Unggulan

Sektor unggulan perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah. Dengan demikian, sektor unggulan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek penciri atau karakteristik dari suatu perekonomian.

Kebijakan ekonomi saat ini pengembangannya diarahkan pada sektor ekonomi unggulan yang erat dengan kepentingan masyarakat luas dan terkait dengan potensi masyarakat serta sekaligus sesuai dengan sumberdaya ekonomi lokal. Peranan sektor unggulan semakin strategis, karena merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap perolehan devisa.

Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah, diantaranya : pertama, sektor unggulan tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi; kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relative besar; ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik kedepan maupun kebelakang; keempat, dapat juga di artikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Yurisinthae dan Dolorosa: 2015).

2.10. Kebijakan Produk Unggulan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mendesain kebijakan pengembangan produk unggulan daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menetapkan produk unggulan daerah dilakukan dengan mengidentifikasi dan menentukan potensi unggulan ekonomi daerah untuk ditetapkan menjadi produk unggulan daerah. Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah. Penetapan produk unggulan daerah dilakukan dengan memenuhi kriteria dan kajian terstruktur.

Pelaksanaan kajian terstruktur penentuan produk unggulan daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan produk unggulan daerah yang menjadi bagian dari penetapan produk unggulan

daerah di tingkat provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dan atau sesuai arah kebijakan pemerintah.

Peningkatan infrastruktur transportasi PUD merupakan pengembangan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pergerakan barang dan manusia menuju pasar. Sarana dan prasarana antara lain:

- a. angkutan darat;
- b. angkutan laut;
- c. angkutan udara;
- d. bandara udara;
- e. terminal bis;
- f. stasiun kereta api; dan
- g. tempat bongkar muat.

Peningkatan infrastruktur umum PUD merupakan pengembangan dalam bidang:

- a. jaringan telekomunikasi;
- b. listrik;
- c. air bersih;
- d. sanitasi;
- e. saluran pembuangan air; dan
- f. tempat pembuangan sampah.

Peningkatan infrastruktur produksi PUD merupakan pengembangan dalam bidang:

- a. ketersediaan dan kelancaran bahan baku;
- b. akses permodalan;
- c. mesin modern; dan
- d. teknologi tepat guna.

Peningkatan infrastruktur pemasaran PUD merupakan pengembangan dalam bidang:

- a. pameran setingkat lokal, regional, nasional, dan
- b. internasional;
- c. pemanfaatan teknologi informasi;
- d. pengadaan ruang pameran; dan
- e. prioritas pemenuhan kebutuhan pasar lokal dan nasional

Penetapan Produk Unggulan Daerah dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penyerapan tenaga kerja;
- b. sumbangan terhadap perekonomian;
- c. sektor basis ekonomi daerah;
- d. dapat diperbaharui;
- e. sosial budaya;
- f. ketersediaan pasar;
- g. bahan baku;
- h. modal;
- i. sarana dan prasarana produksi;
- j. teknologi;
- k. manajemen usaha;
- l. harga;

Dengan pertimbangan kekhususan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan sebagian besar kriteria yang digunakan untuk menentukan produk unggulan daerah kecuali kriteria huruf a sampai dengan huruf f bersifat mutlak harus terpenuhi.

Kriteria PUD adalah:

1. Penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

2. Sumbangan terhadap perekonomian merupakan produk yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan kebelakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.
3. Sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah yang masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi daerah.
4. Dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan daerah bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.
5. Unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk unggulan daerah adalah menggunakan talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.
6. Ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulan daerah untuk terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.
7. Bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan.
8. Modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.
9. Sarana dan prasarana produksi adalah kemudahan bagi pengusaha PUD untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.

10. Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru.
11. Manajemen usaha merupakan kemampuan mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.
12. Harga merupakan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha.

2.11. Manajemen Pemasaran

Pemasaran merupakan ujung tombak bagi suatu perusahaan yang sangat mendukung keberlanjutannya di sektor unggulan. Sukses atau tidaknya sebuah perusahaan di sektor unggulan tergantung dari segi pemasarannya. Jika pemasaran dapat menarik konsumen maka perusahaan tersebut akan mendapatkan *profit* (laba), dan begitu pula sebaliknya suatu perusahaan akan mengalami kerugian jika pemasarannya tidak berjalan dengan baik. Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial (Rangkuti: 2014). Akibat dari pengaruh berbagai faktor tersebut adalah masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas.

Pemasaran adalah menghubungkan penjual dengan pembeli potensial. Pemasaran merupakan menjual barang dan barang tersebut tidak kembali ke orang yang menjualnya. Kegiatan yang memberikan standar kehidupan serta suatu proses dalam menentukan permintaan konsumen akan barang dan jasa, memotivasi penjualan, mendistribusikan ke konsumen akhir dengan keuntungan sebagai imbalannya (Alma: 2013).

Pemasaran harus menjadi suatu konsep bisnis strategis yang bisa memberikan kepuasan berkelanjutan bukan kepuasan sesaat untuk tiga stakeholder utama di setiap perusahaan yaitu pelanggan, karyawan dan pemilik perusahaan. Adanya kepuasan yang di rasakan konsumen menimbulkan respon

positif berupa terjadinya pembelian ulang dan menganjurkan konsumen lain agar membeli produk yang sama. Keuntungan berlipat ganda akan diperoleh produsen, melalui penyebaran informasi positif dari konsumen ke konsumen lain.

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya (Kotler dan Kelner: 2009). Pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasabahnya terhadap produk dan jasa. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, maka setiap perusahaan perlu melakukan riset pemasaran, karena dengan melakukan riset pemasaran inilah dapat diketahui keinginan dan kebutuhan konsumen yang sebenarnya.

Pengertian pemasaran bagi setiap perusahaan tidak ada perbedaan. Hanya yang menjadi masalah adalah penerapan pemasaran untuk setiap jenis perusahaan memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, pemasaran yang dijalankan untuk perusahaan yang menghasilkan produk berupa barang, tentu akan sangat berbeda dengan perusahaan yang memiliki produk berupa jasa seperti perusahaan keuangan. Bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan produk yang diperjualbelikan merupakan jasa keuangan. Oleh karena itu, perlakuan pemasaran terhadap dunia perbankan pun sedikit berbeda dengan perusahaan lainnya.

Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang bisa memenuhi permintaan terhadap produk, diantaranya mengubah harga, memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran distribusi, sebagainya (Tjiptono dan Chandra: 2012).

Unsur-unsur utama pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga unsur utama, yaitu:

1. Unsur Strategi Persaingan

Unsur strategi persaingan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. *Segmentasi Pasar*

Segmentasi pasar adalah tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing segmen konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri.

b. *Targeting*

Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki.

c. *Positioning*

Positioning adalah penetapan posisi pasar. Tujuan *positioning* ini adalah untuk membangun dan mengomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen.

2. Unsur Taktik Pemasaran

Terdapat dua unsur taktik pemasaran yaitu,

a. *Deferensiasi*, yang berkaitan dengan cara membangun strategi pemasaran dalam berbagai aspek di perusahaan. Kegiatan membangun strategi pemasaran inilah yang membedakan *deferensiasi* yang dilakukan suatu perusahaan dengan yang dilakukan oleh perusahaan lain.

b. Bauran Pemasaran, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mengenai produk-produk, harga, promosi dan tempat. Untuk pemasaran pada produk, *marketing mix* tidak hanya meliputi *product, price, place, dan promotion* saja, tetapi juga meliputi empat elemen tambahan yaitu *people, process, phisical evidence* dan *productivity and quality*.

BAB III METODOLOGI

3.1 Jenis Data

Dilihat dari sumbernya, data yang digunakan dalam Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ini ada dua jenis yaitu data sekunder dan data primer.

1. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya seperti; RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, PDRB Menurut Lapangan Usahadan lain-lain.

2. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data-data primer yang dikumpulkan yaitu data kondisi visual dan informasi-informasi kualitatif terkait produk-produk unggulan daerah.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Analisis dalam kajian ini membutuhkan data dari beberapa aspek yang akan dikumpulkan selama kegiatan berlangsung. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam identifikasi ini antara lain:

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan teknik observasi ini digunakan peneliti dalam mengadakan pengamatan terhadap kondisi produk-produk potensi daerah. Untuk memperoleh data yang akurat peneliti menelusuri tiap-tiap kecamatan yang menjadi obyek penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data dilapangan.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dengan teknik dokumentasi, dengan cara mengutip atau menyalin dokumen-dokumen yang relevan untuk digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder yang banyak dibutuhkan.

3. Wawancara Mendalam

Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dilakukan kepada para penyusun kebijakan di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengetahui skala prioritas kebijakan potensi investasi produk unggulan daerah serta dilakukan terhadap para pelaku usaha yang masuk kategori pengusaha produk unggulan, potensial dan andalan.

3.3. Jumlah Sampel

Sampel kegiatan kajian ini diklasifikasi menjadi 2 yaitu SKPD dan Pelaku Usaha. Sampel SKPD ditujukan kepada SKPD yang tupoksinya terkait dengan 17 subsektor yang menjadi obyek kajian yaitu

1. Pertanian Tanaman Pangan
2. Peternakan
3. Perkebunan
4. Kehutanan
5. Perikanan
6. Pertambangan Dan Penggalian
7. Industri Pengolahan
8. Pengadaan Listrik Dan Gas
9. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang
10. Kontruksi
11. Perdagangan Besar Dan Eceran
12. Transportasi Dan Pergudangan
13. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum

14. Informasi Dan Komunikasi
15. Jasa Keuangan Dan Asuransi
16. Real Estate
17. Jasa Perusahaan
18. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
19. Jasa Pendidikan
20. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial Lainnya
21. Jasa Lainnya.

Sedangkan sampel dari para pelaku usaha dari sektor unggulan terpilih diambil dengan mengacu pada model Slovin (Umar: 2013) yaitu

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan

3.4. Tahapan Analisis

3.4.1. Analisis Sektor Basis

Proses analisis sektor basis dalam kegiatan ini akan dilakukan dengan tahap-tahap berikut:

A. Analisis Local Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau *leading sector*. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah tenaga

kerja per-sektor ekonomi, jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria.

Teknik analisis ini belum bisa memberikan kesimpulan akhir dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis. Namun untuk tahap pertama sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan suatu daerah dalam sektor yang teridentifikasi. Rumus matematika yang digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor-sektor dari daerah tersebut adalah (Warpani, 1984:68) :

$$LQ = \frac{Si/Ni}{S/N} = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Dimana :

Si = Jumlah produksi sektor kegiatan ekonomi i di daerah yang diselidiki

S = Jumlah produksi seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diselidiki

Ni = Jumlah sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas, di mana daerah yang di selidiki menjadi bagiannya

N = Jumlah seluruh buruh di daerah acuan yang lebih luas

Itu jika menggunakan data buruh atau tenaga kerja. Demikian pula jika menggunakan data lain, seperti PDRB. Dari perhitungan Location Quotient (LQ) suatu sektor, kriteria umum yang dihasilkan adalah :

- a. Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi dari pada tingkat wilayah acuan
- b. Jika $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari pada tingkat wilayah acuan
- c. Jika $LQ = 1$, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.

Asumsi metoda LQ ini adalah penduduk di wilayah yang bersangkutan mempunyai pola permintaan wilayah sama dengan pola permintaan wilayah acuan. Asumsi lainnya adalah permintaan wilayah akan suatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

- **Keunggulan Analisis LQ:**

Location Quotient merupakan suatu alat analisa yang digunakan dengan mudah dan cepat. LQ dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. Karena demikian sederhananya, LQ dapat dihitung berulang kali untuk setiap perubahan spesialisasi dengan menggunakan berbagai peubah acuan dan periode waktu. Perubahan tingkat spesialisasi dari tiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan LQ dari tahun ke tahun.

- **Kelemahan Analisis LQ:**

Perlu diketahui bahwa nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya bias, karena tingkat disagregasi peubah spesialisasi, pemilihan peubah acuan, pemilihan entity yang diperbandingkan, pemilihan tahun dan kualitas data.

Masalah paling mendasar pada model ekonomi basis ini adalah masalah time lag. Hal ini diakui, bahwa base multiplier atau pengganda tidak berlangsung secara tepat, karena membutuhkan time lag antara respon dari sektor basis terhadap permintaan dari luar wilayah dan respon dari sektor non basis terhadap perubahan sektor basis. Pendekatan yang biasanya dilakukan terhadap masalah ini adalah mengabaikan masalah time lag ini, namun dalam jangka panjang masalah ini pasti terjadi.

B. Analisis Shift Share

Metoda ini digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi

sektor unggulan daerah dalam kaitannya dengan perekonomian wilayah acuan (wilayah yang lebih luas) dalam dua atau lebih kurun waktu.

Analisis ini bertolak pada asumsi bahwa pertumbuhan sektor daerah sama dengan pada tingkat wilayah acuan, membagi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi daerah (lokal) dalam tiga komponen :

- a. Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW), yaitu mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum.
- b. Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP), yaitu mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.
- c. Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK), yaitu mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan. Apabila komponen ini pada salah satu sektor positif, maka daya saing sektor lokal meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi acuan, dan apabila negatif terjadi sebaliknya.

Dengan demikian apabila perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi kota adalah PEK, maka persamaannya dapat diformulasikan sebagai berikut (Ma'rif, 2000:3):

Pertumbuhan Kinerja Ekonomi Kota - Shift Share Analysis

$$PEK = KPW + KPP + KPK$$

Atau:

Pertumbuhan Kinerja Ekonomi Kota - Shift Share Analysis

$$PEK = \left[\frac{Y^*}{Y} - 1 \right] + \left[\frac{Y'i}{Yi} - \frac{Y^*}{Y} \right] + \left[\frac{y'i}{yi} - \frac{Y'i}{Yi} \right]$$

Di mana :

Y^* = Indikator ekonomi acuan akhir tahun kajian

Y = Indikator ekonomi acuan awal tahun kajian

$Y'i$ = Indikator ekonomi acuan sektor i akhir tahun kajian

Yi = Indikator ekonomi acuan sektor i awal tahun kajian

$y'i$ = Indikator ekonomi daerah (lokal) sektor i akhir tahun kajian

yi = Indikator ekonomi daerah (lokal) sektor i awal tahun kajian

Pergeseran Netto (PN) dihitung dengan rumus :

$$PN = KPP + KPK$$

Selain data pendapatan dapat juga dipergunakan data kesempatan kerja.

1. Keunggulan Shift – Share Analysis:

- a. Digunakan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi
- b. Menggambarkan posisi relatif masing-masing sektor perekonomian daerah terhadap wilayah acuan
- c. Menggambarkan sektor-sektor unggulan yang dapat dipacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- d. Menggambarkan sektor yang posisinya relatif lemah, namun dianggap strategis untuk dipacu (pertimbangan penyerapan tenaga kerja).

2. Kelemahan Shift – Share Analysis:

- a. Asumsi yang digunakan bahwa sektor-sektor ekonomi acuan tumbuh dengan tingkat yang sama,
- b. Pergeseran posisi sektor dianggap linier.

3.4.2. Analisis Produk Unggulan

Untuk menghasilkan analisis produk unggulan daerah dilakukan dengan beberapa teknik analisis sebagai berikut:

A. Metode *Paired Comparison*

Teknik pembobotan diperoleh dengan menggunakan metode *paired comparison*. Skala 1, 2 dan 3 digunakan untuk menentukan bobot setiap indikator.

1 = jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal

2 = jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal

3 = jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal

Bobot indikator diperoleh dengan menentukan nilai setiap indikator terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan rumus:

$$a_i = \frac{X_i}{\sum_{i=1}^m X_i}$$

Dimana:

a_i = bobot indikator ke - i

X_i = nilai indikator ke - i

i = 1,2,3,...

m = jumlah indikator

Total bobot yang diberikan harus sama dengan satu (1,0). Pembobotan berkisar antara 0,00 (tidak penting) sampai 1,00 (sangat penting). Pembobotan kemudian ditempatkan pada kolom kedua matriks. Bentuk pembobotan indikator **Performance** PUD tabel 3.

Tabel 3.1

Matriks Penilaian Bobot Indikator Performance PUD

Indikator Performance PUD	JP	NP	KP	...	Total	Bobot
Jumlah Produksi						
Nilai Produksi						
Kontinuitas Produksi						

Indikator Performance PUD	JP	NP	KP	...	Total	Bobot
Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja						
Sumbangan terhadap PDRB						
Total						

Bentuk penilaian pembobotan Prospek Pengembangan PUD dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 3.2

Matriks Penilaian Bobot Indikator Prospek Pengembangan PUD

Prospek Pengembangan PUD	JP	PPS	KKPP	...	Total	Bobot
Jangkauan Pasar						
Persaingan produk sejenis dengan daerah lain						
Kebijakan kedepan yang telah di tetapkan untuk pengembangan produk						
Ketersediaan sumberdaya						
Total						

Setelah melakukan pembobotan langkah selanjutnya menentukan peringkat (skala) tiap indikator. Skala penilaian berkisar dari 1 sampai 4. 1 = sangat buruk; 2 = buruk; 3 = bagus; dan 4 = sangat bagus.

Langkah selanjutnya menjumlahkan nilai rata – rata tertimbang sehingga diperoleh total nilai antara satu sampai dengan 4. Matriks nilai rata-rata tertimbang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 3.3

Matriks Nilai Rata-Rata Tertimbang

Faktor - Faktor Internal	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai Rata - Rata Tertimbang (A x B)
Performace			
1.			
2.			
Dst.			
Prospek Pengembangan			
1.			
2.			
Dst.			

Faktor - Faktor Internal	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai Rata - Rata Tertimbang (A x B)
Total			

B. Scatter Plot

Untuk menghasilkan klasifikasi komoditi daerah ke dalam kategori produk unggulan, produk andalan dan produk potensial menggunakan *scatter plot* yang mengacu pada hasil hasil pengukuran dan pembobotan terhadap subsektor yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sumbu vertikal (Y) mencerminkan indikator performance. Sedangkan sumbu horizontal (X) mencerminkan prospek pengembangan. Berdasarkan hasil *scatter plot* tersebut dihasilkan empat klasifikasi produk/komoditi sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Klasifikasi Produk

No	Klasifikasi	Keterangan
1	Produk/Komoditas Unggulan	Kategori produk/komoditas yang paling tinggi. Produk unggulan yang memiliki <i>performance</i> produk tinggi dan prospek pengembangan yang tinggi.
2	Produk / Komoditas Andalan	Kategori produk/komoditas yang memiliki nilai tinggi. Produk unggulan yang memiliki <i>performance</i> produk tinggi tetapi prospek pengembangan rendah.
3	Produk / Komoditas Potensial	Produk unggulan yang memiliki <i>performance</i> produk rendah tetapi prospek pengembangan yang tinggi. Produk tersebut membutuhkan penanganan khusus untuk meningkatkan nilai menjadi produk

		andalan atau produk unggulan.
4	Produk / Komoditas Statis	Kategori produk/komoditas yang memiliki rendah. Produk yang memiliki <i>performance</i> produk rendah dan prospek proses pengembangan rendah.

3.4.3. Analisis Strategi Potensi Investasi Produk

Untuk menganalisis strategi pengembangan produk unggulan daerah dilakukan dengan beberapa teknik analisis sebagai berikut:

A. Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*)

Matriks SWOT adalah alat untuk mencocokkan yang membantu dalam mengembangkan empat strategi potensi investasi PUD, yaitu SO (kekuatan-peluang-*strengths-opportunities*), WO (kelemahan-peluang - *weakness-opportunities*), ST (kekuatan-ancaman - *strengths-threats*) dan WT (kelemahan-ancaman - *weakness-threats*). Matriks SWOT memiliki asumsi yakni memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matriks SWOT dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1
Matriks SWOT

Internal Eksternal	Kekuatan (Strength-S)	Kelemahan (Weakness-W)
	1	1
	2	2
	Dst.	Dst.
10	10	
Peluang (Opportunities-O)	Strategi SO	Strategi WO
1	1	1
2	2	2

Dst. 10	Dst. 10	Dst. 10
Ancaman (Threats-T)	Strategi ST	Strategi WT
1	1	1
2	2	2
Dst. 10	Dst. 10	Dst. 10

Sumber: David, 2006.

Matriks SWOT membantu dalam mengembangkan empat strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO, menggunakan kekuatan internal perusahaan/organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal. Organisasi pada umumnya akan menjalankan strategi WO, ST atau WT agar dapat mencapai situasi dimana mereka dapat menerapkan strategi SO.
2. Strategi WO, strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Terkadang terdapat peluang eksternal kunci tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghambatnya untuk mengeksploitasi peluang tersebut.
3. Strategi ST, strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Ini tidak berarti bahwa organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman di lingkungan eksternalnya secara langsung.
4. Strategi WT, strategi ini merupakan strategi defensif yang ditujukan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Sebuah organisasi menghadapi berbagai ancaman eksternal dan akan berada pada posisi tidak aman. Hal tersebut menyebabkan organisasi harus bertahan hidup, bergabung, mengurangi ukuran, mendeklarasikan kebangkrutan atau memilih likuidasi.

BAB IV

GAMBARAN EKONOMI SEKTORAL

Nilai PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sudah mencapai 23,71 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 3,19 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020. Terjadi kenaikan nilai PDRB yang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi regional dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 13,00 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 13,73 triliun rupiah pada tahun 2021. Meskipun pandemi covid-19 belum usai, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 mencapai 5,61 persen. Pertumbuhan ini meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya tumbuh sebesar 0,98 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tanpa adanya pengaruh inflasi.

4.1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing

masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 27,01 persen. Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 26,29 persen, disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13,08 persen. Selain itu ada 2 (dua) lapangan usaha lain yang memiliki peranan cukup besar, yaitu kategori Konstruksi dan kategori Transportasi dan Pergudangan yang memiliki peranan masing-masing sebesar 8,19 persen dan 7,25 persen. Lapangan usaha lain yang tidak disebut diatas, masing-masing memiliki peranan yang tidak lebih dari 6 (enam) persen dan secara keseluruhan peranannya tidak mencapai 20 persen.

Tabel 4.1

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,75	24,87	23,88	25,33	26,29
B	Pertambangan dan Penggalian	1,25	1,27	1,33	1,25	1,12
C	Industri Pengolahan	26,26	25,54	24,59	25,40	27,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08
F	Konstruksi	8,69	9,11	9,58	8,05	8,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,56	13,26	13,78	14,04	13,08
H	Transportasi dan Pergudangan	8,18	8,59	8,97	7,80	7,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,35	1,36	1,38	1,27	1,14
J	Informasi dan Komunikasi	0,92	0,90	0,93	0,92	0,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,04	4,92	5,00	5,18	4,95
L	Real Estate	1,84	1,93	2,00	1,98	1,80
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04

O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,33	3,24	3,38	3,62	3,46
P	Jasa Pendidikan	2,55	2,65	2,76	2,84	2,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,17	1,20	1,47	1,51
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,96	1,00	1,03	0,67	0,59

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS

4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi meskipun pandemi covid-19 belum usai. Nilai PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 13,73 triliun rupiah. Angka tersebut naik 0,72 triliun rupiah dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen, jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya tumbuh sebesar 0,98 persen.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 dikarenakan sudah membaiknya beberapa kategori lapangan usaha pasca pandemi covid-19. Upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak covid-19 sudah cukup berhasil. Selain itu, meningkatnya harga CPO dunia turut mendorong peningkatan produksi komoditi yang merupakan komoditas terbesar di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada tahun 2021, beberapa kategori lapangan usaha sudah kembali meningkat dan kembali ke level sebelumnya setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19. Salah satunya adalah kategori Konstruksi yang mampu tumbuh sebesar 12,05 persen setelah mengalami penurunan yang cukup tinggi pada tahun sebelumnya. Kategori lain seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Perusahaan juga mengalami kontraksi setelah terjadi penurunan pada tahun sebelumnya. Meskipun begitu, masih ada kategori yang mengalami pertumbuhan negatif akibat masih terdampak pandemi covid-19 maupun penyebab lainnya. Kategori Pertambangan dan Penggalian serta kategori Jasa Lainnya masih mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 14,39 persen. Upaya untuk mengencakan vaksinasi menjadi salah satu pendorong tingginya pertumbuhan pada kategori tersebut. Kategori lain yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi adalah kategori Konstruksi dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang masing-masing tumbuh sebesar 12,05 persen dan 9,83 persen. Anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik turut mendorong pertumbuhan pada kategori tersebut.

Tabel 4.2

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017-2023

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,15	6,77	3,71	2,35	2,62
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,95	4,25	7,87	-0,18	-5,09
C	Industri Pengolahan	9,30	7,52	5,33	2,90	6,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,47	7,36	9,39	11,56	3,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,37	7,00	9,34	-3,35	9,05
F	Konstruksi	6,74	5,00	7,17	-12,04	12,05

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,98	7,44	6,40	2,99	5,71
H	Transportasi dan Pergudangan	4,94	8,22	8,09	-8,28	6,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,58	5,74	6,43	-5,65	2,41
J	Informasi dan Komunikasi	4,57	2,96	8,12	7,58	7,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,67	2,17	6,68	9,76	6,62
L	Real Estate	2,24	6,25	6,60	3,26	2,25
M,N	Jasa Perusahaan	3,01	4,98	6,73	-12,46	2,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,14	-0,26	8,81	8,88	9,83
P	Jasa Pendidikan	3,34	6,97	8,22	8,06	2,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,19	5,98	7,58	26,67	14,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,55	7,80	7,34	-31,82	-2,90
Produk Domestik Regional Bruto		6,80	6,48	5,79	0,98	5,61

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

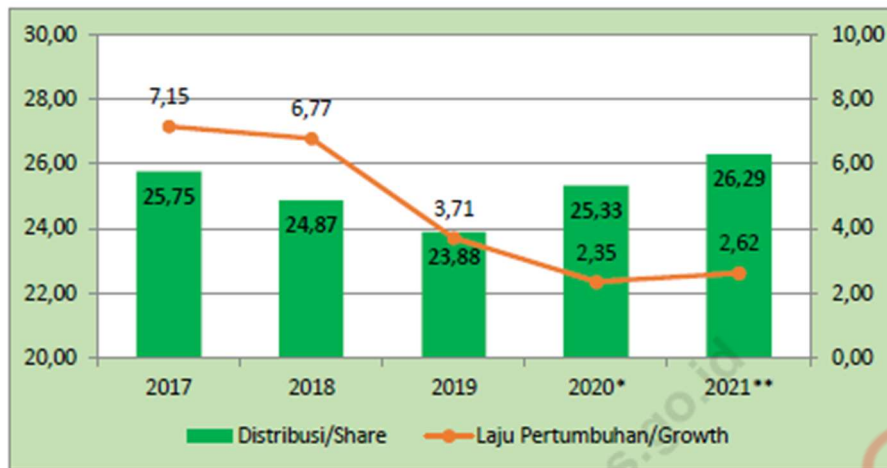
Sumber : BPS

4.3. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha

4.3.1. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian; Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu; dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kotawaringin Barat tahun 2021 mencapai 6,23 triliun rupiah atau sebesar 26,29 persen. Peranan tersebut menjadi yang terbesar dalam 5 (lima) tahun terakhir dikarenakan harga kelapa sawit, yang merupakan kontributor terbesar dalam kategori ini, terdongkrak dengan naiknya harga CPO dunia.



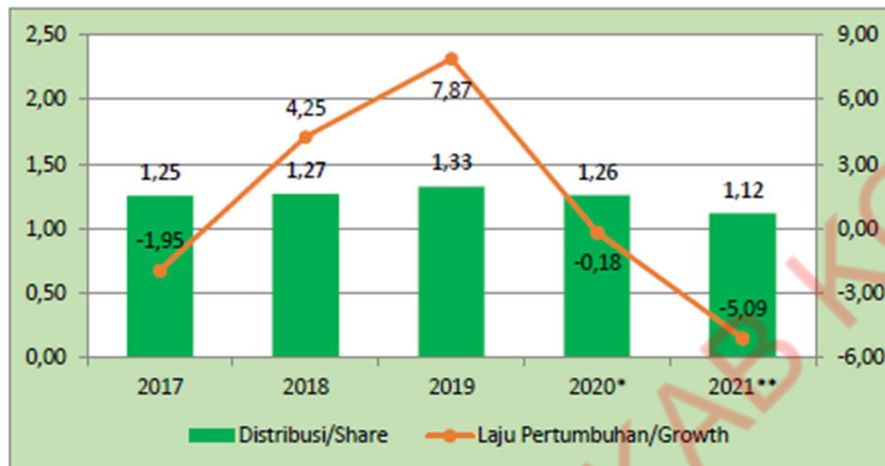
Pada tahun 2021, kategori ini tumbuh sebesar 2,62 persen, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang tumbuh sebesar 2,35 persen. Upaya Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pertanian dalam arti luas dalam beberapa tahun terakhir cukup berhasil, khususnya pada usaha pertanian hortikultura. Salah satu komoditas yang cukup berhasil dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah semangka. Hasil panen komoditas tersebut mampu diekspor ke Malaysia melalui Kalimantan Barat. Sayangnya trek yang terjadi pada buah kelapa sawit akibat cuaca yang tidak menentu membuat pertumbuhan kategori ini relatif rendah. Tingginya harga TBS mampu mendorong para petani kelapa sawit untuk berusaha meningkatkan hasil penennya sehingga pertumbuhannya masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

4.3.2. Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 subkategori, antara lain: subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi; subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit; subkategori Pertambangan Bijih Logam; dan subkategori Pertambangan dan Penggalian lainnya. Di Kotawaringin Barat hanya ada subkategori Pertambangan Bijih Logam, dan subkategori Pertambangan dan Penggalian lainnya.

PDRB kategori Pertambangan dan Penggalian tahun 2021 sebesar 265,23 milyar rupiah. Kategori ini memiliki peranan sebesar 1,12 persen. Pada tahun

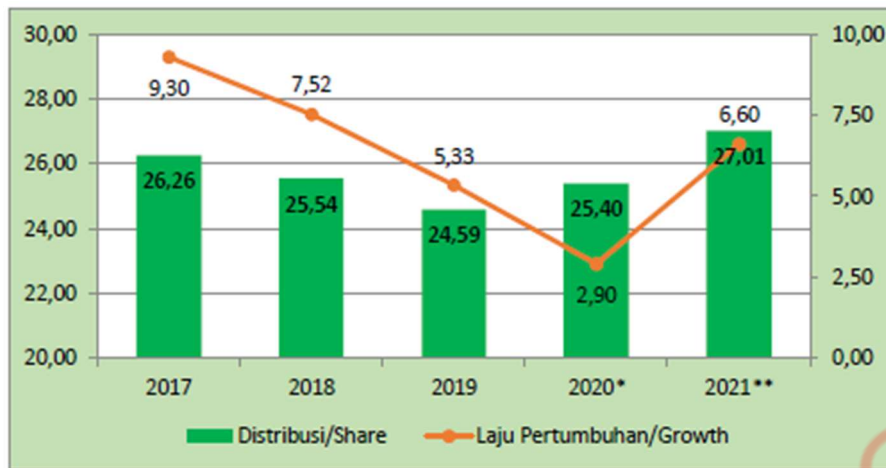
2021, kategori ini mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -5,09 persen. Penurunan ini diakibatkan karena adanya tragedi tertimbunnya pekerja tambang di Sungai Seribu sehingga dilakukan penertiban dan penutupan tambang emas yang tidak memiliki izin.



4.3.3. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan terdiri dari 16 subkategori usaha industri. Namun tidak semua yang ada pada kategori Industri Pengolahan ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti Industri Batubara dan Pengilangan Migas, Industri Pengolahan Tembakau, dan lain sebagainya. Salah satu kegiatan Industri Pengolahan yang terbesar di Kotawaringin Barat adalah kegiatan industri turunan kelapa sawit, khususnya industri CPO.

Kategori Industri Pengolahan adalah kategori dengan peranan terbesar bagi PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan tahun 2021 adalah sebesar 6,40 triliun rupiah. Kategori ini memiliki peranan sebesar 27,01 persen terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat. Kenaikan harga CPO dunia mampu meningkatkan kontribusi kategori ini pada level tertinggi pada tahun 2021 ini.



Pada tahun 2021, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan adalah sebesar 6,60 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang tumbuh sebesar 2,90 persen. Dampak pandemic covid-19 yang terjadi pada tahun lalu sudah mampu diatasi oleh dunia usaha. Beberapa industri yang sempat mengalami penurunan produksi, pada tahun 2021 sudah mulai kembali mengalami peningkatan. Selain itu, sudah mulai terjadi hilirisasi produk, dimana industri minyak goreng sudah meningkat sangat pesat sehingga terjadi peningkatan ekspor yang tinggi pada komoditas tersebut. Meskipun sempat terjadi trek pada buah kelapa sawit yang menyebabkan menurunnya produksi CPO, industri minyak goreng tetap berkembang dengan mendatangkan CPO dari luar daerah.

4.3.4. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas merupakan salah satu kategori dengan kontribusi terkecil bagi perekonomian Kotawaringin Barat. Nilai PDRB kategori ini pada tahun 2021 adalah sebesar 12,25 miliar rupiah atau hanya 0,05 persen dari total PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada tahun 2021, kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,59 persen. Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan yang cukup besar bila dibandingkan tahun 2020 yang mampu tumbuh sebesar 11,56 persen. Meskipun mengalami perlambatan, namun kategori ini masih mengalami peningkatan.

Peluasan jaringan yang terus terus diupayakan oleh PT PLN mampu meningkatkan nilai tambah kegiatan ketenagalistrikan.

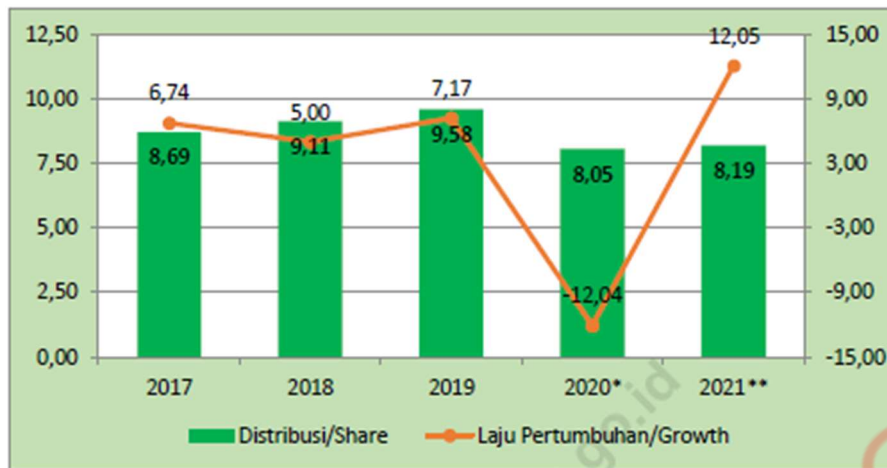
4.3.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Peranan kategori ini terhadap perekonomian Kotawaringin Barat pada tahun 2021 relatif kecil, hanya sebesar 0,08 persen dengan PDRB sebesar 19,88 miliar rupiah. Setelah mengalami penurunan nilai tambah akibat pandemic covid-19 pada tahun sebelumnya, pada tahun 2021 kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 9,05 persen. Upaya PDAM untuk terus memperluas layanan dengan terus meningkatkan pembukaan sambungan baru mampu meningkatkan nilai tambah kegiatan kategori ini.

4.3.6. Konstruksi

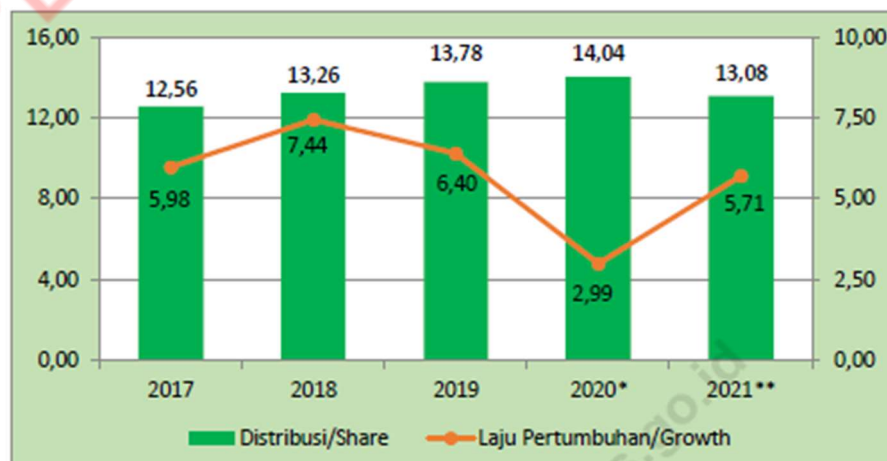
Pada tahun 2021, PDRB kategori Konstruksi sebesar 1,94 triliun rupiah, dengan peranan sebesar 8,19 persen terhadap total PDRB Kotawaringin Barat. Setelah mengalami penurunan akibat dampak pandemi covid-19, pada tahun 2021 peranan kategori ini mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat cukup serius dalam menangani dan meningkatkan infrastruktur.



Pada tahun 2021, kategori ini mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat tinggi setelah mengalami pertumbuhan negatif yang sangat tinggi akibat pandemi covid-19 pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 12,05 persen. Meskipun pandemi covid-19 belum usai, kategori ini mampu kembali pada level sebelum terjadinya pandemi. Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kualitas infrastruktur mampu membuat kategori ini tumbuh sangat tinggi.

4.3.7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

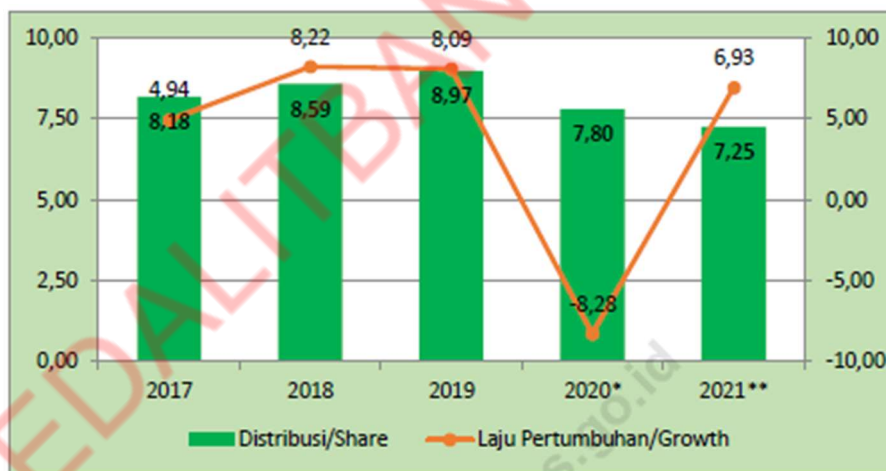
Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kategori dengan kontribusi yang besar bagi PDRB Kotawaringin Barat. Keberadaan dua pintu keluar masuk perdagangan (bandara dan pelabuhan) di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadikan kategori ini sangat strategis.



Pada tahun 2021, peranan kategori ini sebesar 13,08 persen dengan PDRB sebesar 3,10 triliun rupiah. Kategori ini cukup terdampak pandemi covid-19 karena menurunnya perekonomian rumah tangga dapat menyebabkan permintaan menurun. Pada tahun 2021, kategori ini tumbuh sebesar 5,71 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat sudah mulai meningkat.

4.3.8. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) subkategori, namun hanya 5 (lima) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu Angkutan Darat; Angkutan Laut; Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Angkutan Udara; serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir.



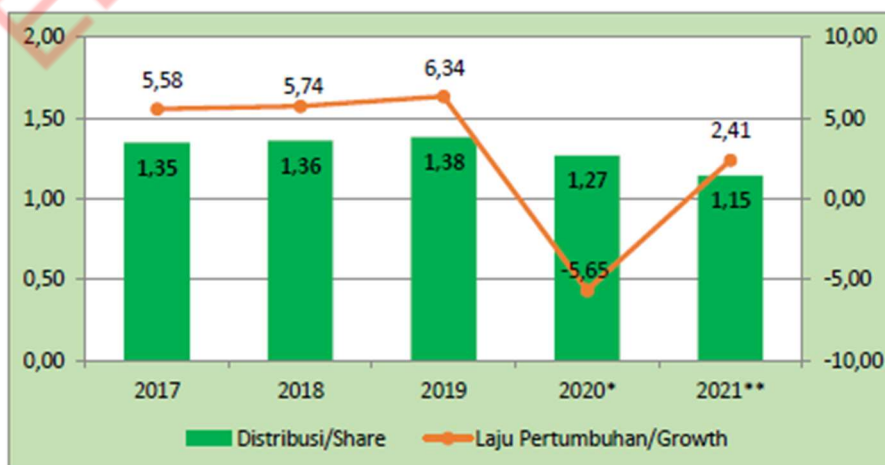
Pada tahun 2021, peranan kategori Transportasi dan Pergudangan adalah sebesar 1,71 triliun rupiah atau sebesar 7,25 persen dari total PDRB Kotawaringin Barat. Keberadaan infrastruktur bandara dan pelabuhan membuat kategori memiliki peranan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Namun pandemi covid-19 cukup berpengaruh pada menurunnya peranan kategori ini.

Pada tahun 2021, kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 6,93 persen. Setelah mengalami pertumbuhan negatif pada tahun sebelumnya akibat dampak pandemic covid-19, kategori ini sudah kembali meningkat. Meskipun dalam setiap perjalanan mewajibkan tes covid-19, mobilitas penduduk sudah meningkat. Hal ini terbukti dari meningkatnya kegiatan angkutan pada berbagai moda transportasi. Namun dengan ketatnya peraturan yang diterapkan, kegiatan pada angkutan udara masih mengalami penurunan.

4.3.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki peran yang cukup penting untuk menopang sector pariwisata. Pada tahun 2021, kategori ini berkontribusi sebesar 271,61 miliar rupiah atau 1,15 persen dari PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Kontribusi tersebut menjadi yang terkecil selama lima tahun.

Pada tahun 2021, kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,41 persen. Sama seperti beberapa kategori lainnya, kategori ini mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat dampak pandemi covid-19. Namun membaiknya perekonomian masyarakat mampu membuat kategori ini mengalami peningkatan. Selain itu, mulai menurunnya kasus covid-19 membuat masyarakat mulai berani keluar untuk membeli makanan jadi di rumah makan maupun restoran.



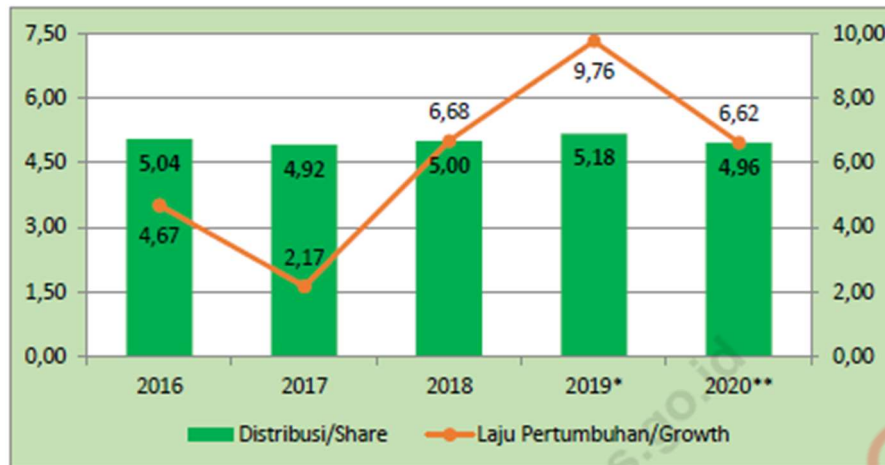
4.3.10. Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kotawaringin Barat selama tahun 2017-2021 masih relative kecil, belum mencapai 1 persen. Pada tahun 2021, kategori ini memiliki peranan sebesar 0,87 persen dengan PDRB sebesar 207,41 miliar rupiah.

Laju pertumbuhan kategori ini sedikit mengalami perlambatan, dari 7,58 pada tahun 2020 menjadi 7,45 persen pada tahun 2021. Namun pertumbuhan tersebut masih tergolong cukup tinggi. Kegiatan *work from home* (WFH) dan belajar dari rumah (BDR) membuat kebutuhan rumah tangga terhadap jasa komunikasi meningkat.

4. 3.11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi terdiri dari 4 (empat) subkategori, yaitu subkategori Jasa Perantara Keuangan; subkategori Asuransi dan Dana Pensiun; subkategori Jasa Keuangan Lainnya; serta subkategori Jasa Penunjang Keuangan. Pada tahun 2021, kategori ini memiliki peranan sebesar 4,95 persen dengan PDRB sebesar 1,17 triliun rupiah. Peranan kategori ini mengalami penurunan mengingat pada dua tahun sebelumnya kategori ini memiliki peranan yang mencapai 5 persen.



Pertumbuhan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2021 adalah sebesar 6,62 persen. Kategori ini mengalami perlambatan setelah pada tahun 2020 mampu tumbuh sebesar 9,76 persen. Selama pandemic covid-19, posisi kredit yang disalurkan perbankan dan jasa keuangan lainnya meningkat.

4.3.12. Real Estate

Kategori Real Estat memiliki peranan yang masih relatif kecil bagi PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2021 kategori ini memiliki peranan sebesar 1,80 persen dengan PDRB nominal sebesar 427,02 miliar rupiah. Laju pertumbuhan kategori ini mengalami perlambatan pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,25 persen, dimana pada tahun 2020 tumbuh sebesar 3,26 persen. Pandemi covid-19 yang belum usai membuat perkembangan kegiatan persewaan real estate masih tertahan.

4.3.13. Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan mejadi kategori dengan peranan terkecil dalam struktur PDRB Kotawaringin Barat tahun 2021, dimana kategori ini hanya menyumbang sebesar 8,75 miliar rupiah. Kontribusi kategori ini hanya sebesar 0,04 persen. Setelah megalami pertumbuhan negatif akibat dampak pandemi covid-19, pada tahun 2021 kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,99 persen. Meskipun begitu, beberapa kegiatan pada kategori ini belum mampu

meningkatkan kegiatannya karena kurangnya permintaan, seperti jasa biro dan agen perjalanan.

4.3.14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Pada tahun 2021, peranan kategori ini adalah sebesar 3,46 persen dengan nominal sebesar 820,22 miliar rupiah. Kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 9,83 persen pada tahun 2021, mengalami percepatan dibanding pada tahun 2020 yang tumbuh sebesar 8,88 persen. Perhatian pemerintah dalam rangka penanganan pandemi covid-19 mampu meningkatkan pertumbuhan jasa administrasi pemerintahan. Alokasi anggaran yang dilakukan untuk melayani masyarakat selama pandemic covid-19 meningkatkan kategori ini untuk tumbuh cukup tinggi.

4.3.15. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2021, kategori Jasa Pendidikan memiliki peranan sekitar 2,57 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dengan nominal sebesar 609,20 miliar rupiah. Angka peranan tersebut sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,05 persen. Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2020 yang tumbuh sebesar 8,06 persen. Pandemi covid-19 mengharuskan kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring atau yang lebih populer dengan belajar dari rumah (BDR). Hal ini sedikit berpengaruh terhadap melambatnya pertumbuhan di kategori ini.

4.3.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2021, peranan kategori ini terhadap PDRB adalah sebesar 1,51 persen dengan nominal sebesar 357,67 miliar rupiah. Selama pandemi covid-19 kategori ini mengalami pertumbuhan terbesar dibandingkan dengan kategori lainnya, dimana kategori ini tumbuh sebesar 4,39 persen. Alokasi anggaran pemerintah di fungsi kesehatan yang difokuskan untuk penanganan covid-19 secara signifikan mampu meningkatkan PDRB kategori ini. Selain itu, layanan jasa kesehatan swasta yang turut mendukung pelayanan kesehatan masyarakat selama pandemi covid-19 juga mendukung peningkatan pertumbuhan kategori ini.

4.3.17. Jasa lainnya

Kontribusi kategori Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat relatif kecil. Pada tahun 2021 kategori ini memiliki kontribusi sebesar 0,59 persen dengan nominal sebesar 139,56 miliar rupiah. Akibat pandemi covid-19 belum usai kontribusi kategori ini menurun kembali menurun. Kategori Jasa Lainnya kembali mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 belum usai. Pada tahun 2021 kategori ini tumbuh sebesar -2,90 persen. Pandemi covid-19 yang masih terjadi selama tahun 2021 harus memaksa usaha-usaha jasa sampai harus menutup kegiatannya, seperti jasa hiburan dan jasa pariwisata, menyebabkan nilai tambah pada kategori ini kembali mengalami penurunan.

BAB V

GAMBARAN UMUM POTENSI INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH

5.1. Sektor Ekonomi Unggulan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkomitmen menjadikan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Kabupaten dengan sector unggulan ekonomi sekunder dan tersier (sector jasa atau industry jasa), dan mulai meninggalkan sector primer (pertanian, perikanan). Untuk melihat sector apakah yang menjadi sector unggulan suatu daerah, dapat digunakan analisis Location Quotient (LQ).

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi dalam PDRB yang dapat digolongkan ke dalam sector basis dan non basis. LQ merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sector di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih dominan dibandingkan sector ditingkat Provinsi dan sebagai petunjuk bahwa kota surplus akan produk sector tersebut. Sebaliknya bila nilai $LQ < 1$ berarti peranan sector tersebut lebih kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat dibandingkan peranannya di tingkat Provinsi. Nilai LQ dapat dikatakan sebagai petunjuk untuk dijadikan dasar menentukan sector yang potensial untuk dikembangkan. Sector unggulan berarti sector tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan Kabupaten Kotawaringin Barat saja, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan di daerah lain atau surplus.

Tabel 5.1 Analisis LQ Kabupaten Kotawaringin Barat

Kategori	Lapangan Usaha	Rasio Sektor PDRB Kotawaringin Barat	Rasio Sektor PDRB Provinsi Kalteng	LQ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,26	0,43	0,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,32	0,03
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	0,27	0,32	0,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,28

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kategori	Lapangan Usaha	Rasio Sektor PDRB Kotawaringin Barat	Rasio Sektor PDRB Provinsi Kalteng	LQ
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,48
F	Konstruksi/Construction	0,08	0,17	0,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	0,13	0,25	0,52
H	Transportasi dan Pergudangan	0,08	0,13	0,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & food Service	0,01	0,04	0,33
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	0,01	0,03	0,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05	0,07	0,72
L	Real Estat/Real Estate Activities	0,02	0,04	0,45
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	0,00	0,00	0,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	0,03	0,12	0,28
P	Jasa Pendidikan/Education	0,03	0,09	0,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01	0,04	0,34
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	0,01	0,02	0,35

Untuk menghindari nilai bias tahunan, maka digunakan nilai LQ rata-rata. Nilai LQ rata-rata adalah nilai LQ sector I selama kurun waktu tertentu pengamatan. Dari nilai rata-rata LQ tersebut dapat diketahui bahwa $LQ < 1$ yang artinya peranan sector tersebut lebih kecil dibanding peranannya di tingkat Provinsi.

5.2 Potensi Investasi

Tabel 5.2 Data Ikm Perkomoditi Tahun 2019 Kabupaten Kotawaringin Barat

KOMODITI	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp 000)	Nilai Produksi (Rp 000)	Nilai Bahan Baku (Rp 000)
Pangan	266	812	29.550.476	47.015.525	25.092.873
Sandang	21	56	2.284.000	3.877.800	1.961.320
Kimia dan Bahan Bangunan	219	814	43.262.700	63.605.005	36.018.176
Logam, Mesin, dan Elektronika	16	63	2.017.500	8.950.700	3.848.900
Kerajinan	54	72	575.875	974.890	489.535
TOTAL	576	1.817	77.690.551	124.423.920	67.410.804

Pada table 5.2 menjelaskan bahwa total nilai investasi pada tahun 2019 berjumlah Rp. 77.690.551.000-, (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Rupiah) nilai invetasi tertinggi dari komoditi pangan yang berjumlah Rp.29.550.476.000-, (Dua Puluh Sembilan Miliar Rupiah) dan nilai investasi terendah dari komoditi Kerajinan yang berjumlah Rp. 575.875.000-, (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Selain nilai investasi terdapat juga nilai produksi, pada tahun 2019 nilai produksi untuk komoditi pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, Logam, Mesin dan elektronika, serta Kerajinan berjumlah Rp. 124.423.920.000 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Rupiah). Nilai produksi tertinggi ada pada komoditi Kimia dan bahan bangunan yaitu sebesar Rp.63.605.005.000-, (Enam Puluh Tiga Miliar Rupiah). Sedangkan nilai terendah sebesar Rp.974.890.000-. (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).

Jumlah unit usaha pada data IKM 2019 tercatat total 576 unit usaha, masing-masing dari Komoditi Pangan berjumlah 266 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 812 orang, Komoditi Sandang berjumlah 21 unit usaha dengan tenaga kerja 56 orang, Komoditi kimia dan bahan bangunan berjumlah 219 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 814 orang, Komoditi Logam, Mesin, dan Elektronika berjumlah 16 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 63 orang, dan Komoditi Kerajinan berjumlah 54 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 72 orang.

Tabel 5.3 Data Ikm Perkomoditi Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KOMODITI	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp. 000)	NILAI PRODUKSI (Rp. 000)	NILAI BAHAN BAKU (Rp. 000)
1	PANGAN	305	906	21.928.060	40.344.947	21.900.770
2	SANDANG	21	56	2.284.000	3.886.900	1.965.120
3	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	212	785	38.322.500	61.848.305	34.766.476
4	LOGAM, MESIN DAN ALAT ELEKTRONIK	20	90	1.940.000	3.872.000	2.085.960
5	KERAJINAN	59	71	480.450	737.150	362.100
TOTAL		617	1.908	64.955.010	110.689.302	61.080.426

Pada table 5.3 menjelaskan bahwa total nilai investasi pada tahun 2020 berjumlah Rp. 64.955.010.000-, (Enam Puluh Empat Miliar Rupiah) nilai invetasi tertinggi dari komoditi Kimia dan Bahan Bangunan yang berjumlah Rp.38.322.500.000-, (Tiga Puluh Delapan Miliar Rupiah) dan nilai investasi terendah dari komoditi Kerajinan yang berjumlah Rp. 480.450.000-, (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Selain nilai investasi terdapat juga nilai produksi, pada tahun 2020 nilai produksi untuk komoditi pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, Logam, Mesin dan elektronika, serta Kerajinan berjumlah Rp. 110.689.302.000 (Seratus Sepuluh Miliar Rupiah). Nilai produksi tertinggi ada pada komoditi Kimia dan bahan bangunan yaitu sebesar Rp.61.848.305.000-, (Enam Puluh Satu Miliar Rupiah). Sedangkan nilai terendah sebesar Rp.737.150-. (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Jumlah unit usaha pada data IKM 2020 tercatat total 617 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 1.908 orang, masing-masing dari Komoditi Pangan berjumlah 305 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 906 orang, Komoditi Sandang berjumlah 21 unit usaha dengan tenaga kerja 56 orang, Komoditi kimia dan bahan bangunan berjumlah 212 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 785 orang, Komoditi Logam, Mesin, dan Elektronika berjumlah 20 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 90 orang, dan Komoditi Kerajinan berjumlah 59 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 71 orang.

Tabel 5.4 Data Ikm Perkomoditi Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	INDUSTRI PENGOLAHAN	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp. 000)	NILAI PRODUKSI (Rp. 000)	NILAI BAHAN BAKU (Rp. 000)
1	PANGAN	635	1.612	15.565.974	79.421.126	56.349.913
2	SANDANG	21	56	2.284.000	3.886.900	1.965.120
3	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	195	677	35.967.500	64.755.655	37.943.531

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	INDUSTRI PENGOLAHAN	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp. 000)	NILAI PRODUKSI (Rp. 000)	NILAI BAHAN BAKU (Rp. 000)
4	LOGAM, MESIN DAN ALAT ELEKTRONIK	20	90	1.940.000	3.872.000	2.085.960
5	KERAJINAN	59	71	480.450	737.150	362.100
TOTAL		930	2.506	56.237.924	152.672.831	98.706.624

Pada table 5.4 menjelaskan bahwa total nilai investasi pada tahun 2021 berjumlah Rp. 56.237.924.000-, (Lima Puluh Enam Miliar Rupiah) nilai investasi tertinggi dari komoditi Kimia dan Bahan Bangunan yang berjumlah Rp.35.967.500.000-, (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah) dan nilai investasi terendah dari komoditi Kerajinan yang berjumlah Rp. 480.450.000-, (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Selain nilai investasi terdapat juga nilai produksi, pada tahun 2021 nilai produksi untuk komoditi pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, Logam, Mesin dan elektronika, serta Kerajinan berjumlah Rp. 152.672.831.000 (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Rupiah). Nilai produksi tertinggi ada pada komoditi Pangan yaitu sebesar Rp.79.421.126.000-, (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Rupiah). Sedangkan nilai terendah di Komoditi Kerajinan sebesar Rp.737.150-. (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Jumlah unit usaha pada data IKM 2021 tercatat total 930 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 2,506 orang, masing-masing dari Komoditi Pangan berjumlah 635 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 1.612 orang, Komoditi Sandang berjumlah 21 unit usaha dengan tenaga kerja 56 orang, Komoditi kimia dan bahan bangunan berjumlah 195 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 677 orang, Komoditi Logam, Mesin, dan Elektronika berjumlah 20 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 90 orang, dan Komoditi Kerajinan berjumlah 59 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 71 orang.

Tabel 5.5 Data Ikm Perkomoditi Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	INDUSTRI PENGOLAHAN	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp. 000)	NILAI PRODUKSI (Rp. 000)	NILAI BAHAN BAKU (Rp. 000)
1	PANGAN	727	1.622	18.207.514	92.883.945	65.901.889
2	SANDANG	21	56	2.284.000	3.886.900	1.965.120
3	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	200	678	35.572.500	68.877.595	41.171.651
4	LOGAM, MESIN DAN ALAT ELEKTRONIK	24	98	2.330.000	4.652.000	2.553.960
5	KERAJINAN	59	71	480.450	737.150	362.100
	TOTAL	1031	2.525	58.874.464	171.037.590	111.954.720

Pada table 5.5 menjelaskan bahwa total nilai investasi pada tahun 2022 berjumlah Rp. 58.874.464.000-, (Lima Puluh Delapan Miliar Rupiah) nilai investasi tertinggi dari komoditi Kimia dan Bahan Bangunan yang berjumlah Rp.35.572.500.000-, (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah) dan nilai investasi terendah dari komoditi Kerajinan yang berjumlah Rp. 480.450.000-, (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Selain nilai investasi terdapat juga nilai produksi, pada tahun 2022 nilai produksi untuk komoditi pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, Logam, Mesin dan elektronika, serta Kerajinan berjumlah Rp. 171.037.590.000 (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Rupiah). Nilai produksi tertinggi ada pada komoditi Pangan yaitu sebesar Rp.92.883.945.000-, (Sembilan Puluh Dua Miliar Rupiah). Sedangkan nilai terendah di Komoditi Kerajinan sebesar Rp.737.150-. (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Jumlah unit usaha pada data IKM 2022 tercatat total 1.031 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 2,525 orang, masing-masing dari Komoditi Pangan berjumlah 727 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 1.622 orang, Komoditi Sandang berjumlah 21

unit usaha dengan tenaga kerja 56 orang, Komoditi kimia dan bahan bangunan berjumlah 200 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 678 orang, Komoditi Logam, Mesin, dan Elektronika berjumlah 24 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 98 orang, dan Komoditi Kerajinan berjumlah 59 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 71 orang.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

BAB VI

MENETAPKAN SEKTOR UNGGULAN DAN PRODUK UNGGULAN

6.1 Menetapkan Sektor Unggulan

Untuk menetapkan sektor unggulan pendekatan yang digunakan adalah analisis Typology Klasson. Analisis ini membagi sektor kedalam 4 kategori kuadran yaitu kuadran I, II, III dan IV. Untuk mengklasifikasi sektor ke dalam kuadran, maka indikator yang digunakan adalah pertumbuhan sektor dan output sektor.

Tabel 6.1

Pertumbuhan Sektor Dalam PDRB 2018-2022 (%)

KODE	Pertumbuhan Sektor/Lapangan Usaha (%)	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	6,77	3,71	2,34	2,24	5
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	4,25	7,87	-0,18	-5,09	3
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	7,52	5,33	2,88	6,72	6
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	7,36	9,39	11,56	3,59	7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste	7,00	9,34	-3,35	9,97	2
F	Konstruksi/Construction	5,00	7,17	-12,04	13,11	7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of	7,44	6,40	2,99	6,01	7
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and	8,22	8,09	-8,32	7,36	7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	5,74	6,34	-5,65	2,52	4

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

KODE	Pertumbuhan Sektor/Lapangan Usaha (%)	2018	2019	2020	2021*	2022**
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	2,96	8,12	7,58	8,94	7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,17	6,68	9,99	7,56	4
L	Real Estat/Real Estate Activities	6,25	6,60	3,26	2,25	6
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	4,98	6,73	-12,46	2,99	7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence;	-0,26	8,81	8,88	3,98	8
P	Jasa Pendidikan/Education	6,97	8,22	8,06	3,33	2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work	5,98	7,68	26,67	14,39	7
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	7,80	7,34	-31,82	-2,90	16

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat pertumbuhan sektoral dalam PDRB bervariasi mulai yang paling tinggi sebesar 16 persen sampai 2 persen.

Sedangkan dari sisi output PDRB juga bervariasi kinerjanya. Output tertinggi dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, disusul sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,

Tabel 6.2 Output Sektor/Lapangan Usaha PDRB (Juta)

KODE	Output Sektor/Lapangan Usaha (Juta)	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry & Fishing	3.609.482,9	3.803.635
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	149.739,1	153.871
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	3.657.494,4	3.874.262
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	8.275,8	8.841
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management	12.009,0	12.216

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

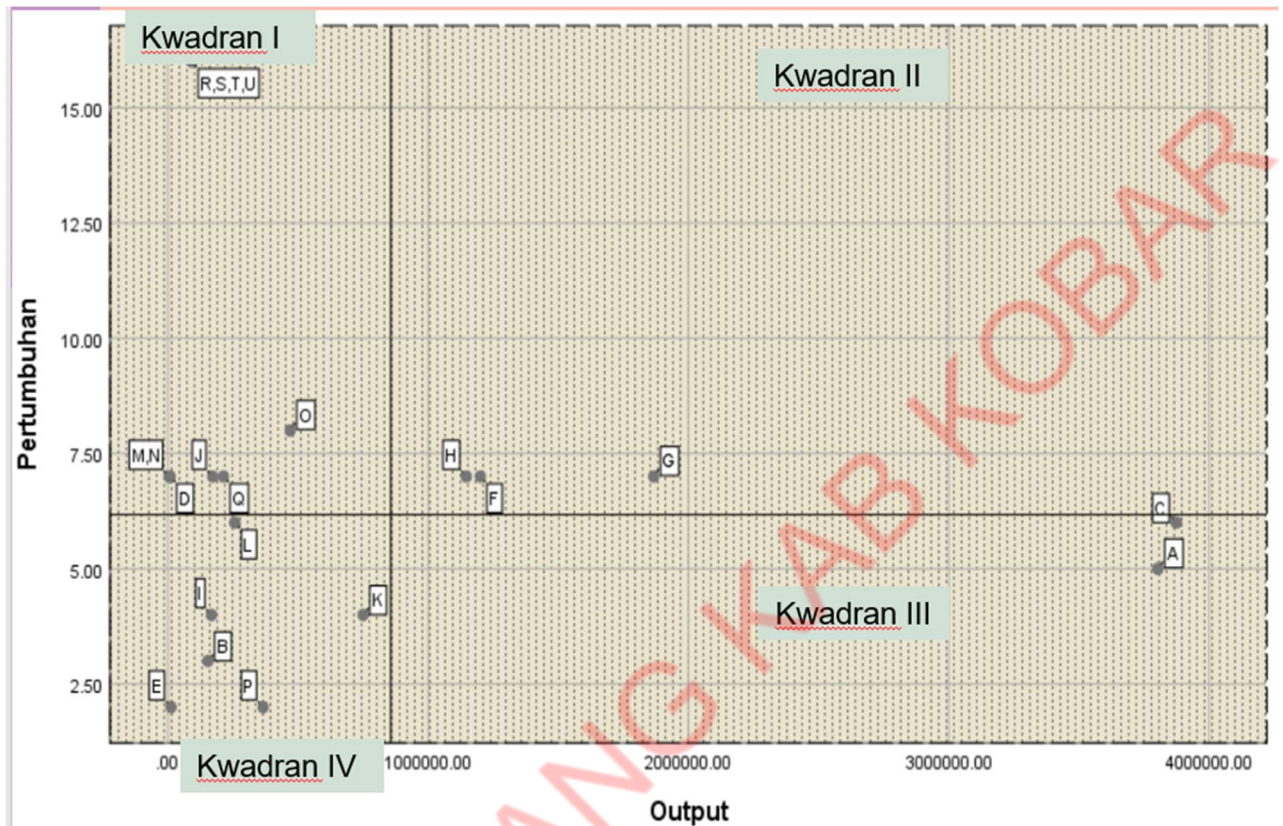
KODE	Output Sektor/Lapangan Usaha (Juta)	2021	2022
F	Konstruksi/Construction	1.116.829,8	1.200.483
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade;	1.743.206,2	1.866.466
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation &	1.071.760,8	1.146.689
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan/Minum/Accommodation & food Service	160.486,5	167.402
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	160.983,7	171.867
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance	723.529,3	749.752
L	Real Estat/Real Estate Activities	242.255,0	256.678
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	5.057,2	5.426
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration &	436.023,3	469.437
P	Jasa Pendidikan/Education	357.818,2	366.095
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work	199.385,4	213.797
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	78.847,5	91.417

Sumber: BPS

Dengan menggunakan data pertumbuhan sektoral dan output sektoral berdasarkan lapangan usaha, dilakukan scatter plot untuk mengetahui posisi kuadran masing masing sektor berdasarkan Klasson Typology.

Gambar 6.1

Scatter Plot Produk Unggulan Klasson Typology



Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan scatter plot Analisis Klasson Typology, maka sektor sektor yang bisa ditetapkan sebagai sektor unggulan adalah

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Industri
- Transportasi
- Konstruksi
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
- Jasa Perusahaan
- Jasa Kesehatan

6.2 Menetapkan Komoditi Unggulan

Potensi Komoditi Unggulan cukup menyebar ke berbagai sub sektor. Sektor hortikultura memiliki potensi komoditi unggulan yang cukup banyak.

Tabel 6.3 HORTIKULTURA Kotawaringin Barat

Keterangan		: Luas Panen		Keterangan		: Produksi	
No	Komoditi	Satuan	Total	No	Komoditi	Satuan	Total
1	Bawang Putih	Hektar	-	1	Bawang Merah	Kuintal	340,00
2	Bawang Daun	Hektar	69,93	2	Bawang Putih	Kuintal	-
3	Kentang	Hektar	-	3	Bawang Daun	Kuintal	8.308,50
4	Kubis	Hektar	-	4	Kentang	Kuintal	-
5	Kembang Kol	Hektar	-	5	Kubis	Kuintal	-
6	Petsai/Sawi	Hektar	97,25	6	Kembang Kol	Kuintal	-
7	Wortel	Hektar	-	7	Petsai/Sawi	Kuintal	10.692,41
8	Lobak	Hektar	-	8	Wortel	Kuintal	-
9	Kacang Panjang	Hektar	114,80	10	Kacang Merah	Kuintal	-
11	Cabai Besar	Hektar	11,60	11	Kacang Panjang	Kuintal	8.838,10
12	Cabai Rawit	Hektar	99,69	12	Cabai Besar	Kuintal	3.649,77
13	Paprika	Hektar	-	13	Cabai Rawit	Kuintal	14.406,09
14	Jamur*)	M ²	-	14	Paprika	Kuintal	-
15	Tomat	Hektar	71,15	15	Jamur*)	Kg	-
16	Terung	Hektar	114,40	16	Tomat	Kuintal	3.022,97
17	Buncis	Hektar	50,00	17	Terung	Kuintal	7.811,35
18	Ketimun	Hektar	84,76	18	Buncis	Kuintal	6.046,97
19	Labu Siam	Hektar	1,21	19	Ketimun	Kuintal	11.821,22
20	Kangkung	Hektar	560,30	20	Labu Siam	Kuintal	-
21	Bayam	Hektar	59,51	21	Kangkung	Kuintal	4.386,67
22	Melon	Hektar	6,20	22	Bayam	Kuintal	5.145,04
23	Semangka	Hektar	330,40	23	Melon	Kuintal	843,64
24	Blewah	Hektar	-	24	Semangka	Kuintal	51.675,37
25	Stroberi	Hektar	-	25	Blewah	Kuintal	-
				26	Stroberi	Kuintal	-

Mengacu pada data sebaran potensi komoditi hortikultura maka 5 komoditi utama yang bisa ditetapkan sebagai produk unggulan sub sektor hortikultura dengan indikator utama total produksi adalah

Produk Unggulan Sub Sektor Hortikultura

No	Komoditi	Satuan	Produksi
1	Semangka	Kuintal	51.675,37
2	Cabai Rawit	Kuintal	14.406,09
3	Ketimun	Kuintal	11.821,22
4	Petsai/Sawi	Kuintal	10.692,41
5	Kacang Panjang	Kuintal	8.838,10

Kotawaringin Barat juga memiliki potensi komoditi hortikultura buah buahan. Jenisnya bervariasi mulai dari tanaman alpukat, belimbing, langsung, jambu biji, jambu air, jeruk, manga, manggis, nenas, pepaya, rambutan, salak, sawo dan komoditi lainnya.

Tabel 6.4 Holtikultura Buah Kotawaringin Barat

Keterangan		: Produksi		Keterangan		: Luas Panen	
No	Komoditi	Satuan	Total	No	Komoditi	Satuan	Total
1	Alpukat	Kuintal	2.995	1	Alpukat	Pohon	5.800
2	Belimbing	Kuintal	7.904	2	Belimbing	Pohon	5.711
3	Duku/Langsar	Kuintal	1.654	3	Duku/Langsar	Pohon	2.830
4	Durian	Kuintal	1.998	4	Durian	Pohon	9.487
5	Jambu Biji	Kuintal	32.336	5	Jambu Biji	Pohon	14.971
6	Jambu Air	Kuintal	13.206	6	Jambu Air	Pohon	10.958
7	Jeruk Siam/Kepron	Kuintal	19.015	7	Jeruk Siam/Kepron	Pohon	13.828
8	Jeruk Besar	Kuintal	-	8	Jeruk Besar	Pohon	-
9	Mangga	Kuintal	23.727	9	Mangga	Pohon	8.642
10	Manggis	Kuintal	669	10	Manggis	Pohon	504
11	Nangka/Cempedak	Kuintal	60.590	11	Nangka/Cempedak	Pohon	46.208
12	Nenas*)	Kuintal	33.357	12	Nenas*)	Rumpun	80.675
13	Pepaya	Kuintal	27.645	13	Pepaya	Pohon	36.874
14	Pisang*)	Kuintal	171.952	14	Pisang*)	Rumpun	234.517
15	Rambutan	Kuintal	49.669	15	Rambutan	Pohon	22.482
16	Salak*)	Kuintal	6.152	16	Salak*)	Rumpun	2.866
17	Sawo	Kuintal	10.517	17	Sawo	Pohon	7.494
18	Markisa/Konyal	Kuintal	-	18	Markisa/Konyal	Pohon	-
19	Sirsak	Kuintal	5.244	19	Sirsak	Pohon	6.811
20	Sukun	Kuintal	32.336	20	Sukun	Pohon	3.029
21	Apel	Kuintal	-	21	Apel	Pohon	-

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

Keterangan		: Produksi		Keterangan		: Luas Panen	
22	Anggur	Kuintal	-	22	Anggur	Pohon	-
23	Melinjo	Kuintal	6.509	23	Melinjo	Pohon	4.825
24	Petai	Kuintal	41.395	24	Petai	Pohon	3.199
25	Jengkol	Kuintal	42.178	25	Jengkol	Pohon	8.282

Berdasarkan analisis potensi komoditas hortikultura buah maka bisa ditetapkan produk unggulan daerah buah sebanyak 5 komoditi yaitu pisang, cempedak, rambutan, jengkol dan petai.

Tabel 6.5 Penetapan PUD Hortikultura Buah

No	Komoditi	Satuan	Total
1	Pisang*)	Kuintal	171.952
2	Nangka/Cempedak	Kuintal	60.590
3	Rambutan	Kuintal	49.669
4	Jengkol	Kuintal	42.178
5	Petai	Kuintal	41.395

Kotawaringin Barat juga memiliki banyak potensi tanaman obat. Ada banyak jenis tanaman obat yang bisa dikembangkan dan ditetapkan sebagai produk unggulan yaitu jahe, laos kencur, kunyit, lempuyang, temu lawak, temu ireng dan kunci, mengkudu, mahkota dewa serta lidah buaya.

Tabel 6.6 Tanaman Obat /Biofarmaka Kotawaringin Barat

Keterangan		: Panen		Keterangan		: Panen	
No	Komoditi	Satuan	Total	No	Komoditi	Satuan	Total
1	Jahe	M ²	13.350	1	Jahe	M ²	13.350
2	Laos / Lengkuas	M ²	4.040	2	Laos / Lengkuas	M ²	4.040
3	Kencur	M ²	2.859	3	Kencur	M ²	2.859
4	Kunyit	M ²	4.258	4	Kunyit	M ²	4.258
5	Lempuyang	M ²	50	5	Lempuyang	M ²	50
6	Temulawak	M ²	110	6	Temulawak	M ²	110
7	Temu Ireng	M ²	75	7	Temu Ireng	M ²	75
8	Temu Kunci	M ²	345	8	Temu Kunci	M ²	345
9	Dlingo / Dringo	M ²	-	9	Dlingo / Dringo	M ²	-
10	Kapulaga	M ²	-	10	Kapulaga	M ²	-

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

Keterangan		: Panen		Keterangan		: Panen	
11	Mengkudu / Pace	Pohon	50	11	Mengkudu / Pace	Pohon	50
12	Mahkota Dewa *)	Pohon	100	12	Mahkota Dewa *)	Pohon	100
13	Kejibeling	M ²	-	13	Kejibeling	M ²	-
14	Sambiloto	M ²	-	14	Sambiloto	M ²	-
15	Lidah Buaya	M ²	50	15	Lidah Buaya	M ²	50

Di sektor peternakan Kotawaringin Barat memiliki banyak potensi untuk ditetapkan sebagai produk unggulan yaitu sapi, kambing, babi, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik, sapi, kambing dan telur.

Tabel 6.7 Data Populasi Dan Produksi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014-2022

No	Indikator Capaian	Jumlah Produksi
1	1. Pencapaian Populasi Ternak (Ekor)	
	- Sapi	17.328
	- Kambing	4.220
	- Babi	3.598
	- Ayam Buras	432.414
	- Ayam Ras Pedaging	6.555.256
	- Ayam Ras Petelur	165.144
	- Itik	34.617
	2. Pencapaian Produksi Daging (Ton)	
	- Sapi	910,48
- Kambing	68,96	
- Babi	142,25	
Unggas :		
- Ayam Buras	554,80	
- Ayam Ras Pedaging	7.079,68	
- Itik	23,06	
3. Pencapaian Produksi Telur (Ton)		

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Indikator Capaian	Jumlah Produksi
	- Ayam Buras	367,55
	- Ayam Ras Petelur	
	- Itik	203,53

Potensi komoditi perkebunan juga sangat menyebar di kecamatan kecamatan Kotawaringin Barat. Komoditi perkebunan ini juga bisa ditetapkan sebagai komoditi unggulan yaitu karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, jambu mete dan aren.

Tabel 6.7 PUD Perkebunan

DATA SERIES PRODUKSI KOMODITI PERKEBUNAN RAKYAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022									
No.	Nama Kecamatan	Jenis Komoditi (Ton)							Total
		Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Jambu Mete	Aren	
1.	Arut Selatan	1.071,30	46,20	8.292,00	9,30	2,24	-	-	9.421,04
2.	Kotawaringin Lama	855,78	64,50	15.372,00	1,00	75,85	-	2,24	16.371,37
3.	Kumai	1.769,99	83,90	18.680,00	2,21	7,76	2,7	-	20.546,56
4.	Arut Utara	149,00	10,90	1.459,69	-	3,79	-	-	1.623,38
5.	Pangkalan Banteng	4.098,00	65,00	4.378,00	1,89	49,00	-	-	8.591,89
6.	Pangkalan Lada	1.576,00	69,50	36.370,00	1,00	41,80	-	-	38.058,30
	TOTAL	9.520,07	340,00	84.551,69	15,40	180,44	2,70	2,24	94.612,54

Di sub sektor tanaman pangan, Kotawaringin Barat memiliki komoditi potensial untuk ditetapkan sebagai komoditi unggulan yaitu komoditi padi sawah, padi ladang, padi, jagung, kedelesai, kacang tanah, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan talas.

Tabel 6.8 PUD Tanaman Pangan

Tanaman Pangan Kotawaringin Barat							
Keterangan		: Luas Panen		Keterangan		: Produktivitas	
No	Kecamatan	Satuan	2022	No	Kecamatan	Satuan	2022
1	Padi Sawah	Hektar	453,30	1	Padi Sawah	Ton/Ha	2,87
2	Padi Ladang	Hektar	276,50	2	Padi Ladang	Ton/Ha	2,87

Tanaman Pangan Kotawaringin Barat							
Keterangan		: Luas Panen		Keterangan		: Produktivitas	
3	Padi	Hektar	729,80	3	Padi	Ton/Ha	2,87
4	Jagung	Hektar	239,00	4	Jagung	Ton/Ha	4,99
5	Kedelai	Hektar	0,40	5	Kedelai	Ton/Ha	1,6
6	Kacang Tanah	Hektar	37,70	6	Kacang Tanah	Ton/Ha	1,43
7	Kacang Hijau	Hektar	0,10	7	Kacang Hijau	Ton/Ha	6,00
8	Ubi Kayu	Hektar	251,50	8	Ubi Kayu	Ton/Ha	26,91
9	Ubi Jalar	Hektar	74,70	9	Ubi Jalar	Ton/Ha	14,50
10	Sorgum	Hektar	-	10	Sorgum	Ton/Ha	-
11	Gandum	Hektar	-	11	Gandum	Ton/Ha	-
12	Talas	Hektar	3,80	12	Talas	Ton/Ha	5,14
13	Ganyong	Hektar	-	13	Ganyong	Ton/Ha	
14	Umbi Lainnya	Hektar	-	14	Umbi Lainnya	Ton/Ha	

Untuk menetapkan produk unggulan daerah, dilakukan scoring terhadap variabel penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis, dapat diperbaharui, ketersediaan pasar, bahan baku, modal, sarana dan prasarana produksi, teknologi, manajemen dan harga.

Tabel 6.9 Peringkat Produk Unggulan Daerah

NO	PRODUK	Score Peringkat
1	Minyak Hewani/Nabati	88,64
2	Pangan Olahan	85,23
3	Sandang	84,09
4	Barang Dari Kayu	82,95
5	Kopi	82,95
6	Destinasi Wisata	81,82
7	Aren	79,55
8	Kelapa Sawit	77,27
9	Kerajinan	72,73
10	Ayam Ras Petelur	72,73

Sumber: Hasi Analisis

BAB VII IDENTIFIKASI PERMASALAHAN INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH

7.1. Identifikasi Permasalahan Sektor Pertanian, Peternakan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pembangunan pertanian ke depan masih tetap memfokuskan kepada upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan, pengembangan benih/bibit berbasis teknologi serta pusat pertumbuhan kawasan - kawasan sentra pengembangan dan pertumbuhan kawasan ekonomi baru.

Namun saat ini terdapat beberapa permasalahan di sektor pertanian yang harus diselesaikan, berikut tabel terkait pemetaan permasalahan di sektor pertanian:

Tabel 7.1

Pemetaan Permasalahan di Sektor Pertanian, Peternakan, Tanaman Pangan dan Hortikultural

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Produksi Pertanian yang masih rendah	1. Keterbatasan sarana budidaya pertanian	1. Kualitas benih/bibit yang belum memenuhi standar kualitas yang baik: sumber tidak jelas/bukan bibit unggul	1. Kurangnya jumlah SDM pertanian yang bertugas di lapangan	1. Kurangnya akses permodalan untuk memulai usaha pertanian
			2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas pakan ternak	2. Kurangnya pengetahuan dan kualitas SDM petugas dalam budidaya pertanian dan petanian	2. Kurangnya pengetahuan teknis budidaya pertanian yang baik dan benar
			3. Peralatan alat dan mesin pertanian dan petanian, Inseminasi Buatan (IB) dan pengolah pakan masih terbatas	3. Kurangnya pengetahuan petugastentang perkembangan teknologi pertanian tepat guna	3. Kurangnya pengetahuan petani tentang perkembangan teknologi pertanian tepat guna

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
			4. Ketersediaan sarana produksi pupuk dan pestisida yang belum merata		
		2. Keterbatasan prasarana penunjang usaha pertanian	1. Belum adanya kawasan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu untuk pengembangan Pertanian secara regulasi 2. Prasarana lahan dan irigasi serta kawasan penggembalaan ternak masih terbatas	Biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk kebutuhan usaha budidaya dan pemasaran pertanian tinggi	Keterbatasan anggaran untuk pembangunan prasarana penunjang usaha pertanian yang membutuhkan biaya tinggi
		3. Resiko usaha pertanian tinggi	1. Resiko gagal panen/puso akibat penyakit tanaman ataupun bencana pertanian akibat dampak perubahan iklim 2. Resiko kematian akibat penyakit hewan atau kehilangan ternak menyebabkan kerugian bagi petani 3. Biaya modal dan produksi tinggi dengan resiko ketidakpastian harga pertanian	Sosialisasi program Asuransi Usaha Tani /Ternak masih belum optimal	Biaya usaha pertanian yang tinggi dan resiko usaha ternak tinggi menyebabkan turunnyaminat masyarakat untuk menjadi petani
		4. Keterbatasan SDM petani	1. Minat generasi muda untuk bertani/beternak masih rendah 2. Petani rata-rata sudah berusia tidak produktif sehingga berpengaruh terhadap produktivitas petani	1. Kurangnya SDMteknis pertanian 2. Kurangnya pengetahuan SDMteknis pertanian	1. Anggapan bahwa usaha pertanian itu tidak menguntungkan dan kotor 2. Usaha pertanian hanya sebagai usahasambilan
		5. Kelembagaan petani belum optimal	1. Kelas kemampuan kelompok tani yang masih rendah	1. Kurangnya pembinaan dari petugas teknis	Banyak kelompok tani terbentuk karena adanya bantuan
		6. Masih adanya penyakit tanaman/ternak/hewan	1. Ketersediaan obat dan vaksin yang terbatas 2. Jumlah personil dan peralatan pengendalian hama penyakit tanaman serta penyakit hewan terbatas 3. Pengawasan lalu lintas ternak masih belum optimal	1. Kurangnya SDM POPT serta medispeternakan 2. Belum adanya regulasi lalu lintas ternak antar kabupaten	1. Kurangnya respon masyarakat jika terjadi kematian ternak 2. Petani tidak mengetahui adanya puskesmas atau lokasi yang jauh dari puskesmas

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
		7. Sistem pemasaran pertanian tidak optimal	1. Rantai tata niaga panjang	1. Belum ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil pertanian	1. Banyak petani masih belum mengetahui pemasaran digital
			2. Akses informasi pemasaran pertanian terbatas	2. Sistem pemasaran online produk pertanian masih belum optimal	2. petani kurang memiliki jaringan yang luas untuk usaha pertanian
		8. Keterbatasan akses permodalan	1. Adanya persyaratan agunan dalam pengajuan permodalan 2. Terbatasnya pembiayaan usaha pertanian	Pihak Dinas Pertanian hanya sebagai fasilitator sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan keputusan pembiayaan	Pihak perbankan yang berwenang penuh terhadap keputusan persetujuan pembiayaan usaha
		9. Pengolahan hasil pertanian masih terbatas	1. Alat pasca panen pengolahan hasil pertanian masih terbatas 2. Ragam dan jumlah kelompok pengolahan hasil pertanian masih terbatas 3. Produk hasil olahan masih belum mampu bersaing di pasar regional	1. Kurangnya SDM petugas teknis 2. Pelatihan dan pembinaan pengolahan hasil pertanian masih terbatas	1. Minat petani rendah untuk mengolah produk hasil pertanian 2. Kemampuan dan ketrampilan petani masih kurang

Sumber: Rencana Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Berdasarkan tabel di atas, perlu adanya perhatian lebih terkait kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, melalui perhitungan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial Dan Ekonomi Kreatif
2. Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman Dan Demokratis
4. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Selanjutnya berkaitan dengan 5 misi Daerah dalam membangun Kotawaringin Barat tahun 2023 s/d 2026 tugas fungsi Dinas Pertanian sangat erat kaitannya dengan Misi 1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial Dan Ekonomi Kreatif.

Sektor pertanian merupakan sektor yang terbesar andilnya dalam kegiatan perekonomian di Kobar. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor Pertanian sebesar 21,49% dari PDRB Kotawaringin Barat Tahun 2020 dimana sektor perkebunan (20,53%), tanaman pangan (0,54%), hortikultura (0,42 %) terhadap total PDRB. Penguatan ekonomi nasional didukung kekuatan ekonomi kerakyatan berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian, peternakan dan perkebunan. Ekonomi kerakyatan juga mengedepankan kemandirian, dalam arti manufaktur hasil-hasil ekonomi hulu juga diupayakan dapat diselenggarakan di Kobar agar nilai tambah produk lebih optimal (PDRB).

Selain itu terdapat beberapa isu strategis harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Pertanian mengingat beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya akan menjadi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani tertera pada sebagai berikut :

Tabel 7.2

Isu-Isu Strategis Sektor Pertanian, Peternakan, Tanaman Pangan dan Hortikultural

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Luasnya lahan tidur/terlantar dan tingginya alih fungsi lahan pertanian serta permasalahan lahan di area kawasan	Produksi dan Produktivitas Pertanian masih rendah merupakan permasalahan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Usaha-usaha yang akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik lahan, infrastruktur sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah melalui peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana/prasarana produksi pertanian serta
2	Produksi pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah	
3	Ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang kurang	

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Permasalahan	Isu Strategis
	memadai	penanggulangan OPT, penyakit ternak dan Dampak Perubahan Iklim pertanian yang sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
4	Ancaman OPT, Penyakit Ternak dan DPI Pertanian	
5	Masih lemahnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	Daya saing usaha pertanian masih rendah disebabkan oleh Kelembagaan petani yang masih lemah dan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani; Lemahnya akses petani terhadap permodalan, Lemahnya daya saing mutu terhadap produk – produk pertanian di pasar regional dan nasional disebabkan skala usaha terbatas dengan nilai jual produk masih rendah
6	Akses terhadap pembiayaan dan permodalan masih terbatas	
7	Mutu produk yang dihasilkan belum mampu bersaing dengan produk luar daerah	
8	Skala usaha terbatas dengan nilai jual produk masih rendah	

Sumber: Rencana Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

7.2. Identifikasi Permasalahan Sektor Perikanan

Distribusi, harga dan akses pangan sangat berkaitan satu dengan lainnya. Kemampuan akses pangan yang cukup oleh setiap penduduk adalah salah satu prasyarat mutlak bagi terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Ketidakmampuan mengakses pangan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerawanan pangan. Masalah ini disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk :

- Memperoleh lapangan pekerjaan (mata pencaharian di sektor formal maupun informal dalam cakupan produksi rumah tangga,
- Hambatan ekonomi, yaitu keterbatasan daya beli,
- Ketidakmampuan memperoleh pangan dari sumber lain seperti bantuan pangan karena kesenjangan sosial.

Sistem distribusi produk pangan dari produsen sampai ke konsumen umumnya terdiri dari berbagai tingkatan (rantai) mulai dari pedagang pengumpul, pedagang pasar sampai tingkat pengecer dan masyarakat konsumen. Dalam rangka meningkatkan stabilitas harga maka perlu kiranya dilakukan pemantauan dan analisis harga pangan pokok di tingkat konsumen dengan tujuan stabilisasi harga pangan di Kalimantan Tengah dapat

dikendalikan dan sebagai bahan analisis kebijakan pemerintah yang terkait dengan harga pangan pokok masyarakat.

Kondisi ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Beberapa masalah dalam stabilisasi harga pangan pokok adalah:

1. Beberapa komoditi pangan hasil budidaya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang disebabkan antara lain adalah karena berbagai keterbatasan penerapan hasil kajian/rekomendasi teknis budidaya spesifikasi lokasi dengan aplikasi lapangan untuk petani pelaku usaha budidaya, teknis bertani, permodalan, fenomena perubahan iklim, dukungan dan komitmen pihak terkait untuk membangun ketahanan pangan wilayah sampai dengan tingkat rumah tangga.
2. Harga pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional khususnya menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal di Kabupaten Kotawaringin Barat pada beberapa komoditas mengalami kenaikan namun masih dalam batas yang wajar, seperti kenaikan bawang merah, cabe merah dan daging sapi. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan untuk konsumsi masyarakat saat menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal. Tahun 2020 komoditas yang mengalami kenaikan yaitu : cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah dan bawang putih bonggol mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan gula, tepung terigu dan minyak goreng kenaikan harga masih dalam batas normal. Solusi pemecahan masalah dalam untuk memenuhi

kebutuhan pangan pokok terutama komoditi beras masyarakat dan beberapa bahan pangan strategis di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

Pemerintah melalui Bulog telah melakukan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai standart dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk komoditi lainnya, peran usaha dalam hal ini pedagang antar daerah/pulau seperti Banjarmasin, Surabaya, Semarang, dll sesuai dengan mekanisme pasar sehingga berdampak pada harga komoditi di pasar lokal di wilayah Kalimantan Tengah namun masih pada batas-batas kewajaran. Selain melakukan monitoring harga, sebaiknya pasokan masuknya barang juga perlu dimonitoring mengingat tingginya ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap daerah lain.

3. Mendorong kemandirian pangan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program-program kerja dinas/instansi teknis terutama untuk komoditas dengan volatilitas harga yang tinggi seperti cabe merah dan bawang merah.
4. Ketersediaan dan pasokan harus dijaga oleh dinas teknis sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat mempengaruhi perkembangan inflasi. Peningkatan produksi lokal akan membantu ketersediaan komoditas tersebut.

Disisi lain, terdapat beberapa permasalahan ketahanan pangan dan perikanan yaitu

A. Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan

Beberapa masalah ketahanan pangan sebagai berikut:

1. Produksi Pangan Secara Nasional Terbatas

Upaya swasembada pangan merupakan tahapan untuk mencapai kedaulatan pangan. Jika produksi pangan secara nasional terbatas maka kedaulatan pangan pun tidak tercapai seiring dengan sektor pertanian yang pada saat ini masih dihadapkan oleh berbagai masalah krusial misalnya saja dalam aspek lahan yang merupakan faktor penting peningkatan produksi

pangan. Pertumbuhan pembangunan yang diikuti oleh penggunaan lahan sebagai bagian dari faktor-faktor produksi sektor industri menjadi tantangan sektor pertanian. Dimana alih fungsi lahan (konversi) terjadi di berbagai daerah sehingga lahan pertanian menjadi berkurang luasnya. Sementara upaya pemerintah memperluas lahan tanam menemui berbagai kendala baik secara teknis maupun operasional. Penurunan kualitas lahan juga menjadi permasalahan tersendiri, dimana eksploitasi tanah / lahan melalui pupuk kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah terutama kandungan mineralnya. Dampak dari penurunan kualitas lahan ini akan mempengaruhi capaian produksi dan prosuktivitas pangan.

2. Penurunan Kualitas dan Kesuburan Lahan

Dalam dunia pertanian, tanah mempunyai peranan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman. Agar mampu menjalankan peran tersebut, maka tanah/lahan harus memiliki kualitas dan kesuburan yang baik. Hal-hal yang menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan lahan antara lain:

- a. Tidak dilakukannya pemberian bahan organik secara rutin
- b. Pemakaian pupuk yang berlebihan
- c. Terjadinya pencemaran bahan kimia berbahaya (pestisida/kimia)
- d. Melakukan pembakaran di atas lahan (merusak tekstur tanah)
- e. Kurangnya pengetahuan pengelola lahan
- f. Kerusakan akibat perubahan iklim/bencana alam

3. Adanya kerawanan pangan di sejumlah daerah di Kabupaten

Fokus pembangunan pada saat ini diarahkan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan. Hal-hal yang perlu dicermati berhubungan dengan permasalahan ini meliputi:

- a. Ketersediaan pangan

- b. Akses terhadap pangan dan penghasilan
 - c. Kerentanan pangan
 - d. Aksesibilitas menuju daerah yang terisolasi.
4. Masyarakat yang masih bertumpu pada 1 jenis makanan (beras)

Penganekaragaman pangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat yang hanya bertumpu pada konsumsi beras saja antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga
 - b. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi
 - c. Pengaruh globalisasi industri pangan siap saji berbasis bahan impor
 - d. Prinsip budaya local
 - e. Lambatnya perkembangan dan penyerapan teknologi pengolahan pangan local
5. Penggunaan pestisida dan bahan kimia (pengawet) pada produk pangan

Pangan yang aman merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Adapun penyebab penggunaan pestisida dan bahan pengawet pada produk pangan baik segar maupun olahan antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk pangan segar
- b. Kemudahan dalam memperoleh pestisida dan bahan pengawet (dijual bebas)

- c. Standar keamanan pangan untuk buah dan sayur impor belum diterapkan
 - d. Belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida dan bahan pengawet
 - e. Tidak adanya kepastian hukum yang mengatur penggunaan bahan berbahaya pada produk pangan segar dan olahan sehingga tidak memberikan efek jera pada pelaku
6. Perlunya penguatan kelembagaan manajemen ketahanan pangan

Adapun hal-hal yang menyebabkan masih lemahnya kelembagaan manajemen ketahanan pangan antara lain:

- a. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam peran DKP sebagai lembaga koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.
- b. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan di daerah Kabupaten/Kota belum seragam
- c. Siklus penggantian pimpinan lembaga ketahanan pangan daerah relatif singkat dan bergantian

B. Sasaran Permasalahan Urusan Perikanan

Urusan bidang Perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan. Adapun yang menjadi permasalahan urusan bidang Perikanan ada sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan SDM yang tersedia untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan;
2. Belum optimalnya penerapan system rantai dingin dalam penanganan hasil produksi perikanan.

Adapun keterkaitan permasalahan dalam pencapaian indikator sasaran dapat di pengaruhi oleh faktor-faktor penghambat internal dan eksternal bagi mana pada table berikut:

Tabel 7.3

Permasalahan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Sektor Perikanan dan Ketahanan Pangan

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1.	Belum optimalnya produktivitas perikananbudidaya dan produksi perikanan tangkap	Belum optimalnya pemanfaatansumber daya perangkat daerah dalam pengoptimalan sumber daya perikanan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan	Kecenderungan peningkatan harga pakan pabrikan untuk usaha budidaya dan belum optimalnya penanggulangan hama dan penyakit ikan
			Armada penangkapan ikan masih didominasi oleh kapal kecil dan aturan penanganan ikan yang selalu berubah
	Belum optimalnya pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDI)	Kurangnya SDM pengawasan	Rendahnya kesadaran pelaku usaha perikan mematuhi peraturan dan perundangan
2.	Belum optimalnya penerapan syestem rantaidingin dalam penangan hasil produksi perikanan	Belum optimalnya pembinaan penerapan syestem rantai dinginyang berakibatkan rendahnya mutu kualitas bahan baku olahan	Kurang pemahaman penggunaan pasca panen dari pembudidaya/nalayan

Sumber: Rencana Strategi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Selain itu terdapat beberapa isu strategis harus dikedepanka yaitu, keterkaitan permasalahan dan isu-isu strategis urusan Perikanan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2023-2026 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.4

Isu-Isu Strategis Sektor Perikanan dan Ketahanan Pangan

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Belum optimalnya produktivitas perikananbudidaya dan produksi perikanan tangkap	Perlunya memaksimalkan potensi sumber daya perikanan yang ada untuk peningkatanproduksi perikanan (adanya kampung nelayan, kampung budidaya, food estate)
2	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perangkat daerah dalam pengoptimalan sumber daya perikanan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan	
3	Belum optimalnya pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDI)	
4	Belum optimalnya penerapan system rantai dingin dalam penanganan hasil produksi perikanan	Belum optimalnya pembinaan penerapan system rantai dingin yang berakibatkan rendahnya mutu kwalitas bahan baku olahan (dersivikasi olahan hasil perikanan mendorong produktifitas hulu dan hilir)
5	Belum optimalnya pembinaan penerapan system rantai dingin yang berakibatkan rendahnya mutu kwalitas bahan baku olahan	

Sumber: Rencana Strategi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

7.3. Identifikasi Permasalahan Sektor Industri

Pada sektor industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang menjadi perhatian yang lebih, karena terdapat beberapa permasalahan yang saat ini masih belum terasi , yaitu:

1. Keterbatasan modal kerja dan/atau modal investasi
2. Kesulitan yang baik dan harga terjangkau
3. Keterbatasan teknologi
4. Sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi)
5. Informasi pasar

6. Kesulitan dalam pemasaran
7. Kesulitan legalitas (perizinan, sertifikat produk)
8. Keterbatasan bahan baku
9. Keterbatasan dalam ketersediaan lahan

Sebelumnya pihak dinas sudah melakukan pembinaan industri kecamatan, namun terdapat kendala yang terjadi pada salah satu industri menengah kecil di salah satu kecamatan. Dimana terdapat kecamatan yang memiliki potensi industri gula aren dengan kualitas nomor 1, akan tetapi setelah dipih dan dikembangkan ternyata tidak bisa dilanjutkan karena kendala bahan baku, ketersediaan lahan (desa dan lahan untuk sawit), dan minimum budidaya yang mengandalkan alam.

BAB VIII

MENDORONG TERWUJUDNYA ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)

8.1. Definisi OVOP (*One Village One Product*)

OVOP (*One Village One Product*) adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Satu Desa dapat diperluas menjadi Kecamatan. Kabupaten/Kota maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis. Untuk menetapkan produk unggulan daerah yang menjadi produk OVOP kriteria yang dipakai meliputi antara lain keunikan khas budaya dan keaslian lokal, mutu dan tampilan produk, potensi pasarnya yang terbuka di dalam dan di luar negeri, serta ontinyuitas dan konsistensi produksi yang didukung sumber daya lokal. Cakupan produk OVOP sangat luas, antara lain produk makanan olahan dan aneka minuman berbasis hasil pertanian dan perkebunan, produk hasil tenun tradisional dan konveksi berbasis seni dan budaya khas lokal, produk kebutuhan rumah tangga, produk dekoratif atau interior, produk cinderamata berbasis seni dan budaya khas lokal, produk herbal atau aromatik, minyak atsiri khas budaya masyarakat lokal dan sebagainya. Perpaduan program ini mencakup fasilitas di bidang teknologi, standarisasi dan mutu produk, promosi dan pemasaran, pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan website.

8.2. Tujuan OVOP (*One Village One Product*)

Adapun tujuan OVOP adalah untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal, dari sumber daya, yang bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki image dan daya saing yang tinggi.

8.3. Implementasi Produk Unggulan Daerah

Implementasi konsep *One Village One Product* (OVOP) di Kotawaringin Barat merujuk pada konsep yang secara regional lebih luas dari tingkat desa. Di daerah ini konsep OVOP diterjemahkan sebagai Satu Kabupaten Satu Kompetensi Inti (SAKASAKTI). Sama halnya dengan konsep OVOP di Jepang dan Thailand, pendekatan SAKASAKTI juga menggunakan sumberdaya lokal, memiliki kearifan lokal dan bernilai tambah tinggi. Selain itu produk-produk yang dipilih juga mempertimbangkan budaya dan kesenian khas daerah yang memiliki nilai jual tinggi. Seperti telah disebutkan dalam bagian dari tulisan ini sebelumnya, terdapat dua konsep yang digunakan dalam membangun kompetensi inti melalui pendekatan OVOP. Pertama, mengembangkan produk lokal yang memiliki keunggulan dari sisi keunikan, kekhasan, kemanfaatan yang lebih besar bagi pengguna produk serta memberikan keuntungan yang besar penghasil produk tersebut. Kedua, daerah harus memilih kompetensi inti dengan melihat keunikan, kekhasan daerah, kekayaan sumberdaya alam, peluang untuk menembus pasar internasional dan dampaknya. Berdasarkan Juknis Dirjen IKM Nomor 98/IKM/PER/9/2013, produk unggulan yang sesuai dengan kriteria OVOP antara lain adalah makanan ringan, minuman saribuah dan sirup buah, kain tenun, kain batik, anyaman dan gerabah/keramik hias. Berdasarkan jenis produk yang di masing-masing kabupaten/kota yang menjadi daerah penelitian maka skor OVOP setiap daerah dapat diketahui.

Dalam implementasi ini produk yang termasuk dalam OVOP (One Village One Product) antara lain CPO, krupuk ampang, ekowisata, daging sapi potong, gula aren dari program varientas aren ganjah dari Kutai Timur menjadi gula semut, jagung, dan anyaman rotan.

Selain itu, terdapat tiga prinsip dasar dalam konsep OVOP yang sesungguhnya bisa diterapkan pada komoditas apapun. Ketiga prinsip dasar yang layak dipenuhi sebelum dikembangkan lebih lanjut adalah: (1) komoditas dikelola dengan basis sumberdaya lokal namun berdaya saing global (*Locally originated but globally competitive*), (2) inovatif dan kreatif yang berkesinambungan, (3) mengedepankan proses pengembangan SDM (*human resources development*). Melalui Pendekatan OVOP selain dapat menjadi pilihan untuk membantu pencapaian kemandirian (meninggalkan perilaku impor) juga untuk meningkatkan image “ daya saing dan keunggulan” dari produk daerah.

BAB IX

MERUMUSKAN STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Dalam merumuskan strategi peningkatan dan pengembangan produk unggulan daerah yakni dimulai dengan penentuan isu-isu strategis terlebih dahulu. Pertama adalah dari adanya permasalahan belum optimalnya produktivitas perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perangkat daerah dalam pengoptimalan sumber daya perikanan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan dan belum optimalnya pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDI) maka perlunya memaksimalkan potensi sumber daya perikanan yang ada untuk peningkatan produksi perikanan dengan mengadakan kampung nelayan, kampung budidaya, dan *food estate*.

Kedua, belum optimalnya penerapan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil produksi perikanan dan belum optimalnya pembinaan penerapan sistem rantai dingin yang berakibatkan rendahnya mutu kualitas bahan baku olahan. Maka perlu untuk memaksimalkan pembinaan penerapan sistem rantai dingin dengan diversifikasi olahan hasil perikanan mendorong produktivitas hulu dan hilir. Menurut Dinas Perikanan, data pada Dinas produk perikanan tidak pernah turun, alat-alat yang digunakan memberikan hibah ke nelayan. Juga sudah tersedia rantai dingin dengan kapasitas 100 ton, sudah ada tempat untuk proses pembusukan ikan, aka nada sistem barter. Seperti contoh Ibu Saripasarma memiliki pengolahan hasil perikanan yang sudah menerapkan sistem rantai dingin yang sudah ber-SNI, sudah memiliki sertifikat, dan sudah mengurus untuk persyaratan ekspor dari balai karantina.

Beberapa strategi peningkatan dan pengembangan produk unggulan daerah menurut bagian dari Dinas Pariwisata adalah dengan memunculkan inovasi pada setiap sektor; memunculkan produk setengah jadi untuk memunculkan produk jadi;

membuat tahapan-tahapan untuk menghasilkan bahan baku; memberlakukan tindakan yang berkesinambungan untuk mengamankan bahan baku.

Banyak juga dari pertanian yang memiliki potensi dapat banyak dikembangkan, akan tetapi ada juga produk pertanian yang strategis tetapi tidak potensi untuk dikembangkan seperti bawang merah. Bawang merah termasuk produk yang strategis tapi kurang bisa dikembangkan. Begitu juga dengan semangka, alpokat memiliki varietas bagus yang berasal dari Kotawaringin Barat asli.

9.1 Pengembangan Pemasaran melalui Hubungan Masyarakat dan Publisitas

1. Pemkab Kotawaringin Barat perlu menjalin kerjasama dengan berbagai media massa, baik cetak, maupun elektronik. Hubungan kerjasama dengan berbagai media massa tersebut harus tetap dipertahankan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah.
2. Berbagai hal yang dapat dilakukan antara lain dengan mengadakan event khusus media atau melalui aktivitas pers. Event khusus media dapat dilakukan dengan mengadakan suatu acara yang khusus mengundang berbagai media sebagai peserta, seperti acara *gathering* atau yang lainnya. Sedangkan aktivitas pers dapat dilakukan melalui *press conference* atau *press release*.
3. Kerjasama perlu diperluas dengan menjalin kerjasama dengan berbagai media massa, seperti media massa yang bertema produk unggulan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat citra Kotawaringin Barat di berbagai segmen pengunjung.
4. Pemanfaatan buletin sebagai media promosi hubungan masyarakat harus tetap dilaksanakan, demikian pula dalam cara penyebarannya.
5. Promosi melalui media hubungan masyarakat juga dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai *event organizer* untuk mengadakan berbagai acara.

6. Acara-acara lain juga dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti PHRI dan asosiasi wisata di Kabuptaen Kotawaringin Barat.

9.2 Pengembangan Promosi Produk Unggulan Daerah

1. Media promosi penjualan tetap perlu dilaksanakan, khususnya keikutsertaan dalam pameran. Hal ini karena pameran sangat penting untuk memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat. Melalui kegiatan pameran pengunjung mendapatkan informasi mendalam mengenai produk unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Selain kegiatan pameran di level regional, Kabupaten Kotawaringin Barat dapat mengikuti kegiatan pameran berskala nasional.
3. Dalam pameran tersebut Kabupaten Kotawaringin Barat dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti KADIN, PHRI dan atau asosiasi bisnis

9.3 Pengembangan Bahan-Bahan Instruksi

1. Promosi produk unggulan daerah melalui media bahan-bahan instruksi bisa dilakukan dengan brosur dan website informatif.
2. Selain dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, penyebaran brosur produk unggulan daerah dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti biro-biro perjalanan wisata, Kadin atau PHRI dan asosiasi bisnis lainnya.

9.4 Pengembangan Komunikasi Personal

1. Media komunikasi personal dijalankan, yaitu melalui penjualan produk unggulan daerah secara langsung, layanan pelanggan (*customer service*), dan promosi dari mulut ke mulut (*word of mouth*). Media penjualan langsung melalui presentasi langsung harus tetap dilaksanakan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah audiens sasaran dan materi presentasi langsung.
2. Metode penjualan produk unggulan daerah secara langsung yang dilakukan sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan presentasi langsung untuk

menawarkan, tetapi juga dengan berdiskusi untuk menggali masukan dan keinginan audien/ konsumen. Hal ini bisa dilakukan pada konsumen yang pernah berkunjung ke Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Presentasi langsung juga dapat dilakukan dengan alat bantu audiovisual, seperti menggunakan CD yang berisi gambaran profil produk unggulan daerah. Media layanan pelanggan (*customer service*) dapat dioptimalkan dengan mensosialisasikan nomor kontak telpon dan alamat kantor produsen produk unggulan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah salah satunya menggunakan strategi OVOP (*One Village One Product*). Penerapan OVOP dalam rangka memajukan industri kerajinan memerlukan adanya strategi khusus yang sesuai dengan prinsip mendasar OVOP yang dilaksanakan di setiap daerah berbeda-beda dengan memetakan aspek-aspek menjadi faktor penting dalam pelaksanaan OVOP.

Pemetaan produk yang dilakukan berbasis OVOP berdasarkan potensi daerah masing-masing di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah seperti peningkatan kualitas dan kuantitas produk, peningkatan akses permodalan dan peningkatan kemitraan untuk pemasaran serta penambahan pangsa pasar baru. Dan juga melakukan penyaringan produk unggulan di Kotawaringin Barat untuk tujuan ekspor sebagai peningkatan dan pengembangan produk unggulan daerah dengan mempertimbangkan hubungan produk terhadap pengemban ekonomi lokal. Dalam menghitung pertimbangan pengemban ekonomi lokal ini menggunakan indikator tambahan antara lain pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan daya saing daerah sebagai pencirian produk unggulan dengan kapasitas pengemban ekonomi lokal.

Maka perlu mendapatkan perhatian dari dinas terkait untuk peningkatan dan pengembangan usaha produk potensial di desa yang berbasis OVOP yang terkait dengan produksi, pemasaran dan pendanaan. Perlu adanya konsultan pendamping

professional untuk memfasilitasi konsultasi usaha supaya dapat lebih maju dan berkembang secara berkelanjutan. Kepada pelaku usaha untuk terus bekerja keras meningkatkan kualitas produksi dan volume penjualan melibatkan anggota masyarakat yang lain sehingga bisa menjadi sentra produk berbasis OVOP di daerah atau desa masing-masing.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

BAB X

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

10.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak potensi investasi produk unggulan daerah yaitu minyak hewani/nabati, pangan olahan, sandang, barang dari kayu, kopi, destinasi wisata, aren, kelapa sawit, kerajinan dan ayam ras petelur.
2. Sektor unggulan dan produk unggulan pada pertumbuhan sektor/ lapangan usaha adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan/ manufacturing; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
3. Beberapa permasalahan investasi produk unggulan daerah yang dialami oleh industri kecil menengah adalah keterbatasan modal kerja dan atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dengan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), kurangnya informasi pasar, kesulitan dalam pemasaran dan kesulitan untuk pengurusan legalitas seperti perizinan dan sertifikat produk.

4. Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah salah satunya menggunakan strategi OVOP (*One Village One Product*). Penerapan OVOP dalam rangka memajukan industri kerajinan memerlukan adanya strategi khusus yang sesuai dengan prinsip mendasar OVOP yang dilaksanakan di setiap daerah berbeda-beda dengan memetakan aspek-aspek menjadi faktor penting dalam pelaksanaan OVOP.
5. Strategi peningkatan dan pengembangan produk unggulan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melakukan pengembangan pemasaran melalui hubungan masyarakat dan publisitas, melakukan pengembangan promosi produk unggulan daerah, melakukan pengembangan bahan-bahan instruksi, dan mengembangkan komunikasi personal.

10.2. Rekomendasi

Rekomendasi untuk para pelaku usaha PUD adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi jaringan / saluran pemasaran melalui pembangunan kerjasama dengan sesama Pelaku usaha dan Pemasar lainnya.
2. Memperluas jaringan relasi pemasaran
3. Pemanfaatan website atau email sebagai sarana promosi dan pemasaran (pengembangan ECommerce)
4. Bekerjasama dalam rangka optimalisasi Koperasi sehingga mampu menyediakan bahan baku dan modal kerja serta mampu mengkoordinir distribusi produk jadi
5. Para pelaku usaha bekerjasama untuk membangun kekuatan bersama sehingga bisa saling menutupi atau mengeliminir kelemahan.

Sedangkan rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat membantu dengan memfasilitasi jalur distribusi yang baru
2. Pemerintah memfasilitasi para Pengrajin dengan mengadakan pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen bisnis dan manajemen persediaan, serta manajemen pemasaran
3. Pemerintah memfasilitasi Promosi produk pada masa – masa penjualan tidak ramai dengan mengadakan event pameran atau yang sejenisnya.
4. Pemerintah mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan dan pengembangan produksi para pelaku usaha PUD Kabupaten Kotawaringin Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, dkk, 2002. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE dan Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Adisasmita, Rahardjo, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- , 2014. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alma, Buchori, 2013. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Arsyad, Lincoln, 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Blakely, Edward J, 1994. *Planning Local Economic Development Theory and Practice*. California: SAGE Publication, Inc.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekononomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad, Suwarsono, 2013. *Manajemen Strategik Konsep dan Alat Analisis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane, 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- , 2009. *Ekonomika Indonesia Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- , 2010. *Ekonomika Pembangunan Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- , 2012. *Perencanaan Daerah Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kajian Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

Nugroho, dkk, 2012. *Metode Kuantitatif Pendekatan Pengambilan Keputusan untuk Ilmu Sosial dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Rangkuti, Freddy, 2014. *ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Setiono, Dedi NS, 2011. *Ekonomi Pengembangan Wilayah Teori dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sjafrizal, 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tjiptono, Fandy dan Chandra, Gregorius, 2012. *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Umar, Husein, 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Widarjono, Agus, 2015. *Statistik Terapan Dengan Excel dan SPSS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.